

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA TANGGUH
BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BUNGASREJO
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI
(Perspektif Pengembangan Masyarakat)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

Khoirul Ali Ahmadi

1701046008

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

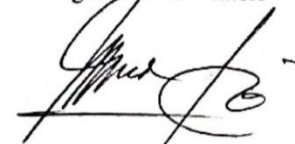
Nama : Khoirul Ali Ahmadi
NIM : 1701046008
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif
Pengembangan Masyarakat)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

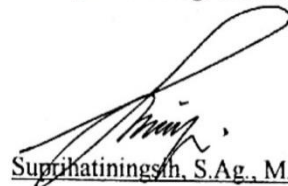
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 April 2021
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi



Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag
NIP. 19690830 199803 1 001



Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760510 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI
(Perspektif Pengembangan Masyarakat)**

Disusun Oleh:
Khoirul Ali Ahmadi
1701046008

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.
NIP. 19690830 199803 1 001

Sekretaris/Penguji II



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP.19800816 200710 1 003

Penguji III



Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP.19730308 199703 1 004

Penguji IV



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP.19660822 199403 1 003

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag
NIP. 19690830 199803 1 001

Pembimbing II



Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760510 200501 2 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 02 Mei 2021



Dr. H. Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 April 2021

Khoirul Ali Ahmadi

NIM: 1701046008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya.

Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., dengan harapan kita sebagai umatnya senantiasa mampu menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran Rasulullah dan semoga kelak mendapat syafaat di *yaumul qiyamah*, aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala macam pertolongan Allah SWT. Penulis juga mendapat banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I., M.S.I. dan Dr. Hatta Abdul Malik, S. Sos. I., M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag. selaku pembimbing I dan Suprihatiningsih, S. Ag., M. Si. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Sariono dan Ibu Muntamah serta kakak Fika Mu'atul Saripah yang senantiasa tulus memberikan doa terbaik dan dukungan serta telah mengupayakan segalanya demi kelancaran studi penulis.
6. Segenap narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa

Tengah serta jajaran perangkat dan warga Desa Bungasrejo yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan informasi terkait implementasi program Destana Bungasrejo.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya angkatan 2017 yang telah berbagi banyak pengalaman selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
8. Serta semua pihak yang telah ikhlas membantu, memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 04 April 2021

Penulis

Khoirul Ali Ahmadi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segenap kerendahan hati, hasil karya tulis sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sariono dan Ibu Muntamah yang tak pernah lelah dan tiada henti membimbing, mendoakandan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Semoga beliau berdua senantiasa dilimpahkan kesehatan, umur panjang serta diberkahi segala apa yang dikerjakan oleh Allah Swt.
2. Para kyai, dosen dan semua guru yang telah tulus ikhlas memberikan segenap ilmunya kepada penulis. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sepanjang hidupnya, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang barokah.
3. Kakak dan segenap saudara yang telah memberikan dukungan dan menjadi semangat buat penulis agar tetap maju menatap masa depan.

Hanya doa terbaik dan ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan atas kebaikan mereka. *Jazaakumullah Khairan Katsiran Wa Jazaakumullah Ahsanal Jaza'*, semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Aamiin.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)¹

¹Mahmud Yunus, *Tarjamahan Al-Quran Karim* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 226.

ABSTRAK

Khoirul Ali Ahmadi (1701046008), Implementasi Program Pelatihan DESTANA (Desa Tangguh Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat).

Indonesia merupakan negara yang sering dilanda bencana. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis. Secara geografis Indonesia diantara Lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Kabupaten Pati merupakan bagian dari Indonesia yang secara topografi diapit oleh pegunungan Muria dan Karst Sukolilo, sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dan beriklim tropis. Letak Kabupaten Pati yang berada di lereng Gunung Muria menyebabkan sifat hidrologi sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi gunung Muria. Sehingga persoalan bencana di Kabupaten Pati bukanlah hal yang baru terjadi. Merespon hal ini, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengadakan program Penanggulangan Bencana dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana dimana dapat mengenali bentuk ancaman, kerentanan, risiko dan potensi yang dimiliki.

Di Kabupaten Pati, Desa Bungasrejo merupakan desa yang sudah dibentuk sebagai Destana sejak tahun 2019. Maka dari itu penulis membuat rumusan masalah berupa: 1) Bagaimana tahapan pengembangan masyarakat dalam implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis menganalisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo menggunakan model tahapan pengembangan masyarakat meliputi tahap pemaparan masalah, analisis masalah, penentuan tujuan dan sasaran, perencanaan tindakan, pelaksanaan dan evaluasi. 2) Faktor pendukung implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo yakni, secara internal adanya fasilitator yang berkompeten; secara eksternal dukungan pemerintah desa; dukungan pemerintah provinsi; sikap gotong royong masyarakat; partisipasi aktif masyarakat. Sementara faktor penghambat yakni, secara eksternal karakteristik masyarakat yang berwatak keras; kapasitas masyarakat yang berbeda; sikap *skeptis* masyarakat; peserta kurang berani menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Program Desa Tangguh Bencana, Masyarakat Tangguh Bencana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Definisi Konseptual	15
3. Sumber dan Jenis Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	19
6. Teknik Uji Keabsahan Data	20
BAB II LANDASAN TEORI: IMPLEMENTASI, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, DESTANA DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT.....	22

A. Implementasi	22
B. Program Penanggulangan Bencana.....	22
C. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	27
D. Pengembangan Masyarakat.....	32
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	32
2. Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	33
3. Tahapan Pengembangan Masyarakat	34
4. Metode Pengembangan Masyarakat.....	35
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI	39
A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	39
1. Sejarah Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	39
2. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	41
3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	42
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	42
5. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	44
6. Kegiatan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	45
B. Profil Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	47
C. Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	55
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	69

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA
TANGGUH BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA
BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI..... 75**

- A. Analisis Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat) 75
- B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 86

BAB V PENUTUP..... 90

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 2. Data Penduduk berdasarkan Usia	49
Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Warga Bungasrejo.....	50
Tabel 4. Data Mata Pencaharian Warga Bungasrejo	51
Tabel 5. Data Penduduk Desa Bungasrejo berdasarkan Agama.....	54
Tabel 6. Jadwal Kegiatan Destana Bungasrejo Kec. Jakenan Kab. Pati.....	64
Tabel 7. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	86
Tabel 8. Faktor Internal dan Eksternal Implementasi Program Destana Bungasrejo	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data IRBI 2018 Provinsi Jawa Tengah.....	2
Gambar 2. Data IRBI Kabupaten di Jawa Tengah.....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	44
Gambar 4. Peta Desa Bungasrejo.....	48
Gambar 5. Kirab Gunung Sedekah Bumi Desa Bungasrejo	53
Gambar 6. Susunan Tim Relawan Desa Bungasrejo Tahun 2019	63
Gambar 7. Struktur Forum PRB Desa Bungasrejo	66
Gambar 8. Peta Risiko Bencana Banjir Desa Bungasrejo.....	67
Gambar 9. Simulasi Evakuasi Bencana	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non alam, maupun bencana sosial.² Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.³

Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total kejadian bencana periode 1 Januari sampai 18 Mei 2020 sebanyak 1.296 kejadian. Kejadian bencana alam yang mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti berturut-turut puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam

²Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” (2012).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

menimbulkan banyak korban jiwa, ada sebanyak 2.015.363 jiwa mengungsi, sedangkan sebanyak 186 jiwa meninggal dan hilang, serta luka-luka 249 jiwa.⁴

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota.⁵ Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 34.718 ribu dan kepadatan penduduk mencapai 987,26 jiwa per kilometer persegi.⁶ Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki gunung api aktif sebanyak 5 yakni Slamet, Dieng, Sindoro, Sumbing dan Merapi. Selain itu, Jawa Tengah pula dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria dan Sesar Pati Thrust. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah. Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki provinsi ini. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko 146.47 (tinggi).⁷

Gambar 1.
Data IRBI 2018 Provinsi Jawa Tengah

NO	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO	NO	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	BANTEN	173.81	TINGGI	18	SULAWESI TENGAH	146.39	TINGGI
2	BENGKULU	163.29	TINGGI	19	SUMATERA UTARA	145.25	TINGGI
3	SULAWESI BARAT	162.92	TINGGI	20	BALI	145.24	TINGGI
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	TINGGI	21	KALIMANTAN SELATAN	145.21	TINGGI
5	MALUKU	160.42	TINGGI	22	PAPUA BARAT	143.27	SEDANG
6	SULAWESI SELATAN	160.05	TINGGI	23	NUSA TENGGARA TIMUR	142.43	SEDANG
7	SULAWESI TENGGARA	158.26	TINGGI	24	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	142.24	SEDANG
8	ACEH	157.56	TINGGI	25	SULAWESI UTARA	141.45	SEDANG
9	KALIMANTAN TIMUR	155.49	TINGGI	26	NUSA TENGGARA BARAT	139.92	SEDANG
10	KALIMANTAN UTARA	153.72	TINGGI	27	SUMATERA SELATAN	139.67	SEDANG
11	JAWA TIMUR	152.40	TINGGI	28	JAMBI	138.64	SEDANG
12	JAWA BARAT	152.13	TINGGI	29	KALIMANTAN BARAT	138.49	SEDANG
13	SUMATERA BARAT	151.56	TINGGI	30	KALIMANTAN TENGAH	133.00	SEDANG
14	LAMPUNG	149.96	TINGGI	31	GORONTALO	130.44	SEDANG
15	RIAU	147.27	TINGGI	32	PAPUA	122.93	SEDANG
16	MALUKU UTARA	146.95	TINGGI	33	KEPULAUAN RIAU	116.40	SEDANG
17	JAWA TENGAH	146.47	TINGGI	34	DKI JAKARTA	72.12	SEDANG

⁴Andri Acu, "Update Bencana Indonesia Tahun 2020," BNPB.go.id, 2020, <https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-indonesia-tahun-2020>. diakses pada 30 November 2020.

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Jawa Tengah Province in Figures 2020* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020), 4.

⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 79.

⁷Pratomo Cahyo Nugroho dkk, *Indeks Risiko Bencana Indonesia* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018), 102.

Ancaman bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi gempa bumi, Tsunami, Letusan Gunungapi, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim/Abrasi serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi adalah Kabupaten Pati. Berdasarkan ancaman bencana tersebut, Kabupaten Pati dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018 memiliki skor 174.00 (tinggi) menempati posisi ke 7 di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan posisi ke 97 di tingkat Nasional.⁸

Gambar 2.
Data IRBI Kabupaten di Jawa Tengah

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	TINGGI
2	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	TINGGI
3	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	TINGGI
4	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	TINGGI
5	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	TINGGI
6	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
7	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	TINGGI
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	TINGGI
9	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	TINGGI
10	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
11	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	TINGGI
12	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
13	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
14	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
15	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
16	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	TINGGI
17	WONGGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	TINGGI
18	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
19	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
20	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	SEDANG
21	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	SEDANG
22	CILACAP	215.20	175.53	159.77	139.90	SEDANG
23	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	SEDANG
24	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	SEDANG
25	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	SEDANG
26	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	SEDANG
27	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	SEDANG
28	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	SEDANG
29	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	SEDANG
30	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
31	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
32	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
33	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Pati merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa dan bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah Kabupaten Pati terdiri dari 3 daratan yakni: 1) Lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, dan Cluwak. 2) Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Jakenan, Winong, Gabus, Kayen bagian

⁸Nugroho, 31.

Utara, Sukolilo bagian Utara dan Tambakromo bagian utara. 3) Pegunungan Karst Sukolilo yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi. Melihat topografi Kabupaten Pati yang diapit pegunungan Muria dan pegunungan karst Sukolilo, menjadi salah satu penyebab banjir. Air hujan dari dua pegunungan ini akan melewati Kabupaten Pati.⁹ Sehingga saat bencana banjir melanda, wilayah dataran rendah di Kabupaten Pati merupakan daerah yang cukup potensial terdampak banjir.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah kedalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.¹⁰ Secara umum bencana banjir akan selalu terjadi pada daerah-daerah rawan bencana yang belum ada upaya pengurangan risiko dengan baik, salah satunya di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati akibat meluapnya Sungai Juwana.

Sungai Juwana atau sering disebut dengan nama Sungai Silugonggo oleh masyarakat sekitar adalah sungai yang melintasi Kota Juwana, Kabupaten Pati. Sungai ini bermuara di Laut Jawa dan mengarah ke barat daya melewati Kota Juwana, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati Kota, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, Undaan Kabupaten Kudus hingga bermuara di Babalan Wedung Kabupaten Demak. Sungai Juwana memiliki beberapa anak sungai yang mengarah ke Pegunungan Kapur Utara (ke arah selatan) dan anak sungai yang mengarah ke Gunung Muria (ke arah barat). Anak-anak sungai tersebut antara lain: Sungai Jodag, Sungai Glonggong, Sungai Wates dan Sungai Landa. Setiap musim penghujan sungai ini meluapkan air banjirnya ke sepanjang

⁹Ragil Nurwahyudi and Maryono, *Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Aspek Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Gabus)* (Semarang: UNDIP, 2018), 1.

¹⁰Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana," *Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, 2012, 17.

Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga menenggelamkan puluhan desa disekitarnya termasuk desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Bungasrejo merupakan sebuah desa di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang terdiri atas 3 pedukuhan yang meliputi Bungascilik (Bungastempel) di sebelah barat, Bungas di sebelah tengah dan Druju di sebelah timur. Desa ini dibelah oleh Sungai Glonggong (anak Sungai Juwana) yang membujur kearah selatan dan disebelah utara berbatasan langsung dengan Sungai Juwana.¹¹ Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Juwana dan dibelah oleh Sungai Glonggong menjadikan Desa Bungasrejo sebagai daerah rawan bencana banjir.

Kejadian banjir yang hampir setiap tahun terjadi pada musim penghujan tepatnya pada awal tahun. Banjir mengakibatkan genangan air merendam seluruh pemukiman dan area persawahan Desa Bungasrejo. Daerah yang paling sering terkena dampak adalah Dukuh Bungascilik karena berada paling barat berdekatan langsung dengan Daerah Aliran Sungai Juwana. Adapun penyebab banjir di Bungasrejo diakibatkan karena di daerah pegunungan Pucakwangi ke selatan pohon-pohon jatinya sudah habis ditebang. Sehingga saat musim hujan tiba, air dari selatan datang dan waduk Babalan di buka, Desa Bungasrejo seperti kolam. Karena disini (Desa Bungasrejo) merupakan titik temu terakhir aliran sungai dari barat dan aliran dari selatan, ditambah karena sungai yang sudah sempit dan mengalami pendangkalan yang awalnya 10 meter menjadi 5 meter.¹² Hal tersebut menandakan bahwa selain faktor alam ada juga faktor campur tangan manusia yang mengakibatkan bencana banjir. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

¹¹“Profil Kampung KB Lestari,” 2017, <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11303>. diakses pada 10 Juni 2020

¹² Wawancara dengan Wasi Sudar (Kepala Desa), 11 Juni 2020

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali.”¹³ (QS. Ar Rum: 41)

Padahal Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi tugas menjaga bumi dan seisinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’¹⁴ (QS. Al Baqarah: 30)

Selain kondisi wilayah yang merupakan daerah rawan bencana, masyarakat Desa Bungasrejo belum sadar dan aktif melakukan kegiatan mitigasi guna mengurangi risiko bencana. Tingkat kesadaran dan kapasitas mereka masih rendah mengenai kebencanaan. Selama ini yang dilakukan masyarakat pada saat terjadi bencana banjir adalah sesuai dengan pengalaman mereka, yakni fokus mengungsi dan menyelamatkan harta benda. Hanya itu saja yang mereka lakukan dari tahun ke tahun. Belum ada upaya kegiatan mitigasi atau pencegahan sebelum terjadinya bencana guna mengurangi risiko bencana.¹⁵

Berdasarkan kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang disebutkan, perlu dilaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang bersifat terpadu dan

¹³ Yunus, *Tarjamahan Al-Quran Karim*, 368–369.

¹⁴ Yunus, 6.

¹⁵ Wawancara dengan Safrudin (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov Jawa Tengah), 09 Juni 2020

menyeluruh. Selain itu juga harus menitikberatkan pada pola kegiatan membangun kesiapsiagaan masyarakat dan tindakan pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk menjawab permasalahan ini perlu ada pihak-pihak yang dapat terjun menangani permasalahan tersebut. Salah satu organisasi pemerintah yang terjun dalam penanganan bencana ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPBD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai upaya pemberdayaan serta membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini berlangsung pada akhir tahun 2019 bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dalam program ini BPBD Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Penanggulangan Bencana Desa yang mana anggotanya merupakan masyarakat itu sendiri, sehingga forum ini dari masyarakat untuk masyarakat.

Dengan dilaksanakannya program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), kondisi Desa Bungasrejo wilayahnya mulai tertata khususnya daerah aliran sungai sehingga setelahnya banjir sudah tak melanda daerah ini. Dalam keseharian, masyarakatnya terlihat lebih peduli dengan lingkungan dengan seperti sudah tidak adanya sampah bercecer disekitar pemukiman maupun daerah sungai. Melihat hal tersebut peneliti ingin mengetahui secara detil mengenai pelaksanaan program DESTANA yang dilaksanakan BPBD Provinsi Jawa Tengah dari perspektif pengembangan masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pengembangan masyarakat dalam implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan khazanah keilmuan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya pengembangan masyarakat bidang bencana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademis bagi para pengembang masyarakat yang fokus dalam bidang bencana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal maupun lanjutan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya mengenai program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), serta dapat mendorong terwujudnya desa-desa yang rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada referensi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain sebagai acuan, tinjauan pustaka ini juga untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

Pertama, penelitian Maruli Tua Sinaga (2019), Skripsi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, meneliti tentang Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat desa tangguh bencana di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang diukur oleh 5 parameter, yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilitas sumberdaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menghadapi bencana di Desa Sukaraja tergolong siap karena sudah mengetahui secara alamiah tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dan kemana harus menyelamatkan diri. (2) Sudah adanya kesepakatan bersama di dalam masyarakat dalam hal evakuasi

dan mengikuti simulasi evakuasi bencana. (3) Rencana tanggap darurat dalam menghadapi bencana di Desa Sukaraja tergolong siap karena masyarakat sudah mengikuti sosialisasi mitigasi bencana dan tersedianya jalur evakuasi. (4) Sistem peringatan bencana dalam menghadapi bencana di Desa Sukaraja tergolong kurang siap karena hanya mengandalkan kentongan sebagai alat sistem peringatan bencana. (5) Mobilisasi sumberdaya dalam menghadapi bencana di Desa Sukaraja tergolong kurang siap, karena tidak adanya alokasi khusus untuk tanggap darurat bencana. Dari kesimpulan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 34 orang (85%) masyarakat anggota program Desa Tangguh Bencana di Desa Sukaraja siap dalam menghadapi bencana.¹⁶ Perbedaan antara penelitian Maruli Tua Sinaga dengan penelitian peneliti adalah penelitian Maruli Tua Sinaga memfokuskan pada tingkat kesiapsiagaan anggota program Desa Tangguh Bencana dilihat dari indikator pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Kedua, penelitian Deski Irandi (2017), Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, meneliti tentang Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan program KBBM di wilayah Kota Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan penghambat keberhasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu program KBBM dapat diimplementasikan di Kelurahan Prenggan dan Bener. Pelatihan yang difokuskan di Kelurahan Prenggan yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (CBFA) dan manajemen

¹⁶Maruli Tua Sinaga, "Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan" (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2019).

pengelolaan sampah sedangkan di Kelurahan Bener yaitu Pertolongan Pertama. Faktor penghambat secara internal yaitu *cash request* yang diajukan hanya sebagian yang di acc dan sebagian pending; faktor penghambat secara eksternal yaitu adanya birokrasi-birokrasi pemerintahan yang sangat panjang. Jadi tantangan yang paling berat ada di advokasi pemerintahan; materi-materi tidak bisa langsung disampaikan kepada masyarakat dan direalisasikan karena birokrasi-birokrasi pemerintahan yang sangat panjang; tidak adanya media informasi yang berfungsi menyebarkan hasil atau program dari pertemuan pemangku kebijakan (tingkat RW/RT) kepada warga; rendahnya kesadaran warga terhadap ancaman dan bahaya di daerahnya; adanya gap-gap di tingkat warga; masyarakat susah diajak berfikir. Faktor pendukung secara internal yaitu adanya kerjasama dengan DRC sehingga ada bantuan dana untuk program KBBM; dukungan dari pengurus PMI dan staff kuat; SDM sudah ada yaitu relawan PMI. Faktor pendukung secara eksternal yaitu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa; semangat anggota sibat.¹⁷ Perbedaan antara penelitian Deski Irandi dengan penelitian peneliti adalah penelitian Deski Irandi memfokuskan pada pelaksanaan program KBBM di wilayah Kota Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan penghambat keberhasilan program KBBM di wilayah Kota Yogyakarta sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Ketiga, penelitian Miftakhul Munir (2016), Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai evaluasi dalam dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal apakah

¹⁷Deski Irandi, "Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

telah mencapai tujuan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama yang siap dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat lebih mengerti akan peran dan tanggung jawab terhadap bencana, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bencana dan dapat mengurangi risiko, berjalannya relawan Desa Tangguh Bencana diharapkan dapat di dukung oleh berbagai pihak, dan di dukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai.¹⁸ Perbedaan antara penelitian Miftakhul Munir dengan penelitian peneliti adalah penelitian Miftakhul Munir memfokuskan pada evaluasi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Keempat, penelitian Mustika Wati Alfia Ningtyas (2018), Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, meneliti tentang Penguatan Kelompok Tangguh Bencana (Pendampingan Dalam Upaya Membangun Kemandirian Masyarakat Siaga Banjir di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban). Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kerugian akibat banjir, strategi dan hasil pemberdayaan melalui penguatan kelompok tangguh bencana untuk siaga banjir. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* yaitu melakukan suatu penelitian bersama-sama dengan masyarakat secara aktif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kerugian yang diakibatkan dari dampak Bengawan Solo yakni ada beberapa aspek diantaranya *pertama*, aspek ekonomi yakni kegiatan warga dalam mencari dafkah terganggu. *Kedua*, aspek infrastruktur yakni kerusakan jalan dan tempat

¹⁸Miftakhul Munir, "Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kendal, Skripsi" (Universitas Diponegoro, 2016).

ibadah. *Ketiga*, aspek kepemilikan yakni banyaknya hewan yang sakit dan banyaknya sawah yang tergenang dan gagal panen seluas 62 ha. *Keempat*, aspek kesehatan yakni masyarakat banyak yang terkena penyakit seperti DBD, malaria dan penyakit kulit. (2) Strategi pemberdayaan dalam penguatan kelompok tangguh bencana di Desa Patihan yakni proses awal dilakukan pendampingan masyarakat siap siaga dengan langsung melakukan praktik sosialisasi dan pembelajaran mengenai kebencanaan agar pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan dapat meningkat sehingga saat menghadapi bencana masyarakat lebih siap siaga. Kemudian dengan dilakukannya pelatihan siap siaga dengan tujuan agar kelompok tangguh bencana dapat menjadi pendorong atau tonggak masyarakat lainnya agar lebih siap siaga jika sewaktu-waktu bencana datang tanpa mereka sadari. (3) Hasil dari pencapaian pendampingan kelompok tangguh bencana di Desa Patihan dengan membangun kemandirian masyarakat siaga banjir dalam menghadapi bencana yakni meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan, serta kelompok tangguh bencana menjadi aktif serta memahami langkah apa nantinya yang dilakukan saat penanganan bencana banjir di daerah Desa Patihan tersebut. Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam masalah penanganan bencana.¹⁹ Perbedaan antara penelitian Mustika Wati Alfia Ningtyas dengan penelitian peneliti adalah penelitian Mustika Wati Alfia Ningtyas memfokuskan pada tingkat kerugian akibat banjir, strategi dan hasil pemberdayaan melalui penguatan kelompok tangguh bencana untuk siaga banjir sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Kelima, penelitian Zahirah Zahrah (2017), Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meneliti

¹⁹Mustika Wati Alfia Ningtyas, "Penguatan Kelompok Tangguh Bencana (Pendampingan Dalam Upaya Membangun Kemandirian Masyarakat Siaga Banjir Di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban), Skripsi" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tentang Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program Kelurahan Siaga Bencana di Ngaliyan Semarang dan menentukan faktor pendukung dan penghambat program Kelurahan Siaga Bencana di Ngaliyan Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketepatan kebijakan dalam pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan sudah dapat dikatakan tepat walaupun belum sepenuhnya menjadi kunci untuk menuntaskan risiko bencana yang ada di Kota Semarang, sementara itu pembentukan KSB di Kecamatan Ngaliyan sudah dibentuk oleh lembaga yang akuntabel. Dalam praktiknya, dalam beberapa penghambat dalam pelaksanaan program dikarenakan faktor lemahnya sumberdaya manusia, sumber dana dan fasilitas. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait SDM dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas, sumber dana dengan pemberian estimasi khusus untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur pada pelaksanaan program.²⁰ Perbedaan antara penelitian Zahrah Zahrah dengan penelitian peneliti adalah penelitian Zahrah Zahrah memfokuskan pada implementasi program Kelurahan Siaga Bencana di Ngaliyan Semarang dan menentukan faktor pendukung dan penghambat program Kelurahan Siaga Bencana di Ngaliyan Semarang sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya

²⁰Zahrah Zahrah, "Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jurnal" (Universitas Diponegoro, 2017).

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.²¹

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif memiliki makna peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.²² Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan positivistik studi kasus yang berarti metodologi penelitian yang diuraikan terdahulu berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mencari rerata dari frekuensi kejadian atau rerata dari keragaman individual. Banyaknya kejadian atau banyaknya individu serta representasinya menjadi pertimbangan utama untuk menetapkan kebermaknaan (signifikansi) penarikan kesimpulan.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan studi lapangan di Desa Bungasrejo untuk mendapatkan data-data yang akurat sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program DESTANA di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

2. Definisi Konseptual

- a. Implementasi menurut Rinaru merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²⁴

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

²²Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 11.

²³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30.

²⁴ Muhammad Dedi Irawan dan Selli Aprilla Simargolang, *Implementasi E-Arsip pada Program Studi Teknik Informatika*, Jurnal Teknologi Informasi Vol. 2 No. 1 Juni 2018, hlm. 76

- b. Menurut Suherman dan Sukajaya program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tersebut.²⁵
- c. Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.²⁶
- d. Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.²⁷
- e. Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.²⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni wawancara dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, jajaran pemerintah Desa Bungasrejo, Forum PRB dan masyarakat Desa Bungasrejo selaku pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pelatihan

²⁵Rusydi Ananda, Tien Rafida, and Candra Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: Perdana, 2017), 5.

²⁶ Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana” (2007).

²⁷ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” (n.d.).

²⁸Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 6.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

DESTANA, dokumentasi berupa arsip kegiatan, foto-foto kegiatan selama pelaksanaan program DESTANA serta observasi ditempat berlangsungnya program DESTANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data.³⁰ Data sekunder merupakan data penunjang yang diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, foto-foto kegiatan, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui:

a. Wawancara (*Interview*)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³²

³⁰Sugiyono, 225.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, 2015, 308.

³²A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.³³

Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Desa Bungasrejo, masyarakat setempat selaku pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pelatihan DESTANA BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁴ Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap beberapa sumber data seperti kondisi lokasi penelitian meliputi letak geografis, kondisi topografi, tingkat kerawanan wilayah serta kapasitas sumber daya manusia Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terkait implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi metode wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 233.

³⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 123.

³⁵ J R Raco, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data autentik yang bersifat dokumenter, baik data itu berupa catatan harian, transkrip, agenda, program kerja, arsip, memori.³⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan program DESTANA tahun 2019 dan foto yang berkaitan dengan implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷ Selama melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 aktivitas dalam menganalisis data yang meliputi:³⁸

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, milih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini peneliti merekap hasil wawancara kemudian memilah yang sesuai dengan implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, 2015, 335.

³⁸Sugiyono, 338–345.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada proses penarikan kesimpulan yang berupa uraian singkat ini peneliti berharap dapat menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif rumusan masalah dan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan terus berkembang. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam kaitan penelitian ini supaya memiliki tingkat kepercayaan tinggi sesuai data di lapangan, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³⁹

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah uji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

³⁹Sugiyono, 273.

mengecek data dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi teknik dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB II

LANDASAN TEORI: IMPLEMENTASI, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, DESTANA DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Implementasi

Dalam Kamus Inggris Indonesia yang berjudul *An English-Indonesia Dictionary* menyatakan bahwa implementasi berasal dari kata *implementation* yang berarti pelaksanaan.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan; penerapan.⁴¹ Menurut Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴² Menurut Rimaru implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan atau perbuatan yang terencana berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Program Penanggulangan Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan.⁴⁴ Menurut Arikunto dan Jabar program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan

⁴⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 391.

⁴¹Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Arti Implementasi" (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.).

⁴²Eko Suryana Siska Haryati, Aji Sudarsonom, "Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)," *Jurnal Media Infotama* 11, no. 2 (2015): 131.

⁴³Muhammad Dedi Irawan and Selli Aprilla Simargolang, "Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika," *JURTI (Jurnal Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (2018): 76.

⁴⁴ Aplikasi KBBI Luring, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Menurut Suherman dan Sukajaya program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tersebut. Sedangkan menurut Feurstein program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa program adalah sebuah rancangan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan berbagai unit.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan penanggulangan bencana merupakan serangkaian rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.⁴⁶

Secara umum kegiatan penanggulangan bencana diawali dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana kegiatan yang biasa dilakukan meliputi:⁴⁷

- 1) Pencegahan (*prevention*), kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan risiko bencana.
- 2) Mitigasi (*mitigation*), serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui mitigasi struktural dan non struktural.

⁴⁵Rusydi Ananda, Tien Rafida dan Candra Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: Perdana, 2017), 5.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”.

⁴⁷Sulistiyawan, *Manajemen Bencana Mari Kenali Ancamannya Dan Kurangi Risikonya* (Semarang: Seminar Kampus Relawan, 2020), 17–27.

- 3) Kesiapsiagaan (*preparedness*), serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna.
- 4) Peringatan Dini, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Dalam tahap saat bencana meliputi:

- 1) Tanggap Darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 2) Bantuan Darurat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Dalam tahap pasca bencana meliputi:

- 1) Pemulihan, serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 2) Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- 3) Rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Tujuan penanggulangan bencana yang termaktub dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 4) Menghargai budaya lokal;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kegiatan manajemen bencana yang baik. Manajemen bencana merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah (kejadian) bencana.⁴⁸

Secara umum kegiatan manajemen bencana terbagi dalam 3 kegiatan yakni:⁴⁹

1. Kegiatan pra bencana meliputi,
 - a) Pencegahan (*prevention*), merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan risiko bencana dan upaya tidak mempertemukan bahaya dengan kerentanan/kapasitas.
 - b) Mitigasi (*mitigation*), merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui mitigasi struktural (pembangunan fisik) maupun mitigasi non struktural (penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana).

⁴⁸Yogi Cahyo Ginanjar, "Manajemen Bencana," 2018, <https://bpbdbabelprov.go.id/manajemen-bencana/>.

⁴⁹Sulistiyawan, *Manajemen Bencana Mari Kenali Ancamannya Dan Kurangi Risikonya*.

- c) Kesiapsiagaan (*preparedness*), merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna.
- d) Peringatan Dini (*early warning*), merupakan upaya memberikan tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya bencana. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*) dan bersifat resmi (*official*).

Dalam kegiatan pra bencana ini pemberdayaan masyarakat atau komunitas sangat penting bagi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana.

2. Kegiatan saat terjadi bencana meliputi

- a) Tanggap Darurat (*response*), merupakan segala upaya pada saat bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan bencana.
- b) Bantuan Darurat (*relief*), pemberian bantuan darurat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

3. Kegiatan pasca bencana meliputi

- a) Pemulihan (*recovery*), merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana meliputi kegiatan fisik dan non-fisik.
- b) Rehabilitasi (*rehabilitation*), merupakan upaya untuk membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah, fasilitas umum & sosial dan menghidupkan roda perekonomian.
- c) Rekonstruksi (*reconstruction*), merupakan program untuk perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik.

C. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Dengan demikian Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.⁵⁰

Tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh Bencana adalah:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Secara garis besar Desa Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.
- 2) Perencanaan: penyusunan rencana penanggulangan bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi

⁵⁰Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana”.

Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan).

- 3) Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerinyah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
- 4) Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- 5) Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- 6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- 1) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender kedalam program.
- 2) Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminim mungkin.
- 3) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.

- 4) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- 5) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka akan kerentanan warga.
- 6) Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- 8) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.
- 9) Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan demi keberlanjutan.
- 10) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Program Desa Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Bencana adalah urusan bersama.
- 2) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- 3) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- 4) Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.
- 5) Dilakukan secara Partisipatoris.
- 6) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- 7) Inklusif.
- 8) Berlandaskan Kemanusiaan.
- 9) Keadilan dan Kesetaraan Gender.
- 10) Keberpihakan pada Kelompok Rentan.
- 11) Transparansi dan Akuntabilitas.

- 12) Kemitraan.
- 13) Multi Ancaman.
- 14) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan..
- 15) Pemaduan kedalam Pembangunan Berkelanjutan.
- 16) Diselenggarakan secara Lintas Sektor.

Kegiatan dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana meliputi:

- 1) Pengkajian Risiko Desa

Dalam mengembangkan desa tangguh bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan.

- 2) Perencanaan PB dan Perencanaan Kontijensi Desa

- a. Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Des) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa. Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya.

- b. Rencana Kontinjensi Desa

Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

- 3) Pembentukan Forum PRB Desa

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, Desa dan Kelurahan perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini dapat

dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa dan kelurahan.

Pembentukan Forum PRB Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif.

4) Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB

Agar Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa-kelurahan dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik-topik terkait lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu PRB akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau Penilaian Ancaman, Kerantanan dan Kapasitas PMI, metode-metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau Penilaian Pedesaan Partisipatif, dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

5) Pemaduan PRB kedalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/ (RPB Des) program diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Bila berdiri sendiri, RPB kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun RPB Des,

Forum PRB Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat.

6) Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Rencana PB dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perlu diimplementasikan oleh seluruh warga.

7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di tingkat Desa

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

D. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut KBBI, pengembangan masyarakat berarti proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.⁵¹ Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by*

⁵¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Pengembangan Masyarakat,” kbbi.kemdikbud.go.id, accessed February 3, 2021, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan masyarakat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan%20masyarakat).

undertaking collective actions”. (upaya untuk membantu orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama). Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan segala upaya mengembangkan individu maupun kelompok supaya dapat memecahkan masalah-masalah sosial guna meningkatkan kualitas hidupnya kedepan.

2. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat memiliki berbagai macam tujuan guna mencapai target yang ingin dicapai dalam selang waktu yang ditentukan. Pada umumnya tujuan pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi dalam pengambilan keputusan berkelanjutan terhadap kegiatan tersebut. Berikut beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- f. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

⁵²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 4–6.

- g. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- h. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.⁵³

3. Tahapan Pengembangan Masyarakat

Dalam kegiatan pengembangan masyarakat ada enam tahap ketika merencanakan suatu program, meliputi:

- a. Tahap pemaparan masalah (*problem posing*): tahap mengelompokkan dan menentukan masalah dan persoalan yang dihadapi warga dari kelompok tersebut. Masyarakat umumnya menyadari permasalahan yang mereka hadapi tapi tak bisa diungkapkan. Peran pekerja sosial disini adalah memberikan penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah dengan kelompok tersebut.
- b. Tahap analisis masalah (*problem analysis*): tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- c. Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*): tahap ini pekerja sosial bersama masyarakat menentukan tujuan yang menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang dan statemen tentang petunjuk umum. Sementara sasaran lebih bersifat lebih khusus dibanding tujuan. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada masyarakat.
- d. Tahap perencanaan tindakan (*action plans*): tahap ini merupakan tahap kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pekerja sosial memperhatikan tenaga kerja, waktu, faktor penghambat & pendukung, permasalahan stakeholder dan segala segala hal yang terkait dengan kegiatan.

⁵³Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR Bekerja sama dengan UMP Press, 2014), 45–46.

- e. Tahap pelaksanaan kegiatan: tahap mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Pekerja sosial dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat aksi yang dilakukan.
- f. Tahap evaluasi, dilaksanakan secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan bahkan harian.⁵⁴

4. Metode Pengembangan Masyarakat

Dalam praktik pengembangan masyarakat terdapat beragam metode pengembangan masyarakat yang dapat diterapkan, diantaranya:⁵⁵

a. RRA (*rapid rural appraisal*)

RRA merupakan metode penilaian keadaan secara cepat yang dalam praktiknya kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Sebagai suatu tekni penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik meliputi:

- 1) Riview data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas;
- 2) Obserbasi secara langsung;
- 3) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya;
- 4) Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik;
- 5) Studi kasus, sejarah lokal dan biografi;
- 6) Kecenderungan-kecenderungan;
- 7) Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat;
- 8) Pembuatan laporan lapang secara cepat.

b. PRA (*participatory rapid appraisal*)

⁵⁴Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 84–86.

⁵⁵Sri Handini Sukesi dan Hartati Kanty Astuti, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir” (Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka Press, 2019), 82–89.

PRA merupakan metode penilaian secara partisipatif yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang dalam yang terdiri dari semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dengan difasilitasi oleh orang-orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Melalui kegiatan PRA ini dilakukan berbagai kegiatan meliputi;

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan;
- 2) Analisis keadaan berupa:
 - Keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungannya dimasa depan;
 - Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan penyebabnya;
 - Identifikasi (akar) masalah dan alternatif pemecahan masalah;
 - Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
- 3) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak (dapat dilaksanakan, efisien dan diterima oleh sistem sosialnya);
- 4) Rincian tentang *stakeholders* dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program yang akan diusulkan.

c. FGD (*focus group discussion*)

FGD merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dan seringkali juga mengundang narasumber. Tahapan dalam metode FGD adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kejelasan tujuan FGD, utamanya tentang isu-isu pokok yang akan didiskusikan sesuai dengan tujuan kegiatan;
- 2) Persiapan pertanyaan yang akan diajukan;
- 3) Identifikasi dan pemilihan partisipan dan atau narasumber yang berkompeten;

- 4) Persiapan ruangan diskusi;
- 5) Pelaksanaan diskusi;
- 6) Analisis data (hasil diskusi);
- 7) Penulisan laporan.

Dalam metode ini fasilitator memegang peran strategis karena dengan keterampilannya memandu diskusi akan menentukan proses dan hasil FGD. Maka ada beberapa jenis pertanyaan yang harus dipersiapkan oleh fasilitator, diantaranya:

- 1) Pertanyaan pembuka, berfungsi sebagai pencairan suasana agar proses diskusi berjalan lancar;
- 2) Pertanyaan pengantar, tentang isu umum yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai pencairan suasana;
- 3) Pertanyaan transisi, pertanyaan tentang isu pokok yang berfungsi sebagai pembuka wawasan partisipan;
- 4) Pertanyaan kunci, terdiri dari sekitar 5 isu yang akan dikaji melalui FGD
- 5) Pertanyaan penutup, tentang catatan tambahan yang ingin disampaikan oleh para peserta.

d. PLA (*participatory learning and action*)

PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar mengenai suatu topik dan setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi tersebut. PLA merupakan bentuk baru dari metode yang dahulu dikenal sebagai "*learning by doing*" atau belajar sambil bekerja. Metode PLA memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) PLA merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama;
- 2) *Multi perspective*, yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah yang riil yang dilakukan oleh para pihak yang beragam cara pandangnya;

- 3) Spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat;
 - 4) Difasilitasi oleh ahli dan stakeholders (bukan anggota kelompok belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambil keputusan; dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambil keputusan;
 - 5) Pemimpin perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
- e. SL atau Sekolah Lapang (*Farmers Field School*)
- SL atau FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman tentang alternative dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar-bersama, SL atau FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.

BAB III
IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA TANGGUH
BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BUNGASREJO
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI

A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga Usaha. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014,

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mengimplementasikan UU 23 tahun 2014, pada tahun 2016 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk perangkat daerah yang menangani bencana yaitu BPBD Provinsi akan diatur sebagaimana amanat PP No.18 tahun 2016. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu tupoksi terkait penanganan kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.⁵⁶

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah. Berikut data alamat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 1 F Semarang
No. Tlp : (024) 3519927
Fax : (024) 3519904
(024) 3519186

⁵⁶Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Profil BPBD," accessed March 1, 2021, http://bpbdd.jatengprov.go.id/PPID/FILE_DOWNLOAD/PROFIL/PROFIL_BPBD.pdf.

Website	: www.bpbd.jatengprov.go.id
Whatsapp	: 08813809409
Facebook	: facebook/BPBDJATENG
Twitter	: twitter.com/bpbdjateng
Instagram	: instagram.com/bpbdjateng
Email	: bpbd@jatengprov.go.id , bpbd_jateng@yahoo.com , poskoaju.bpbdjateng@gmail.com ⁵⁷

2. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:⁵⁸

Visi

JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA “(TETEP) Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi”

Misi

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

⁵⁷PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah, “Profil BPBD Provinsi Jawa Tengah,” accessed March 1, 2021, <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/profil-bpbd/>.

⁵⁸PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah, “Visi Misi BPBD Jawa Tengah 2019-2024,” accessed March 1, 2021, <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/2018/01/15/visi-dan-misi-jawa-tengah/>.

3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana⁵⁹

Sasaran

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah⁶⁰

1) Kedudukan

Sekretariat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

2) Tugas

Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan

⁵⁹PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah.

⁶⁰Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Tugas Pokok Dan Fungsi," accessed March 1, 2021, http://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE_DOWNLOAD/TUPOKSI/TUGAS_POKOK_DAN_FUNGSI.pdf.

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

3) Fungsi

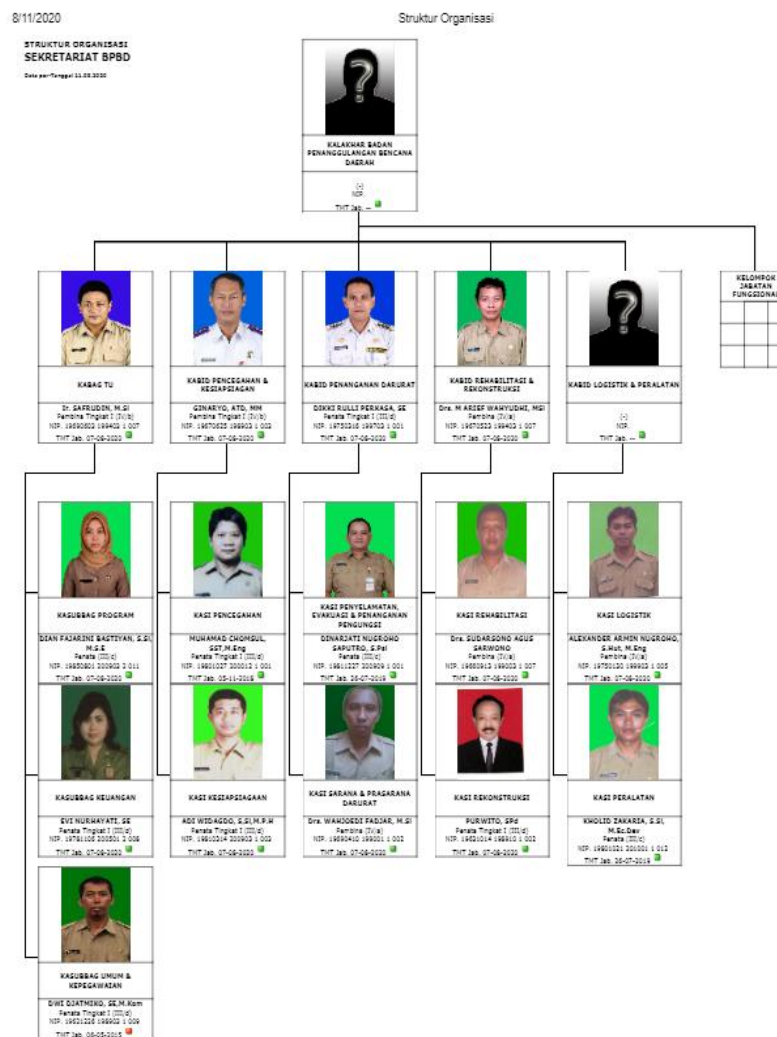
Sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:⁶¹

Gambar 3.
Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jateng



<https://bkd.jatengprov.go.id/soth/show/7>

1/1

⁶¹PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah, “Struktur Organisasi BPBD Prov. Jateng,” accessed March 1, 2021, <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/struktur-organisasi/>.

6. Kegiatan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalam Rancangan RPJMN Tahun 2020–2024, dibahas tentang penanggulangan bencana yang mana prioritas di penanggulangan bencana ini masuk kedalam prioritas ke-6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional.

Program penanggulangan bencana didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam Misi Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Program tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana.⁶²

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan penanggulangan bencana merupakan serangkaian rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Berikut kegiatan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah:⁶³

⁶²Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, “Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020,” 2020, 7.

⁶³PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah, “KAK 20,” accessed March 2, 2021, <https://bpbdd.jatengprov.go.id/PPID/wp-content/uploads/2020/06/KAK-2020-ALL.pdf>.

- a. Bidang I (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
 1. Kegiatan Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana
 - a) Budaya Sadar Bencana dan Hari Kesiapsiagaan Bencana
 - b) Pengembangan Forum PRB
 - c) Sarasehan/Gelar Relawan Penanggulangan Bencana
 - d) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
 - e) Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (KPRB)
 - f) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
 - g) Sarasehan/Gelar Relawan Penanggulangan Bencana
 - h) Sosialisasi dan Penerapan Sekolah Aman Bencana
 2. Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
 - a) Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
- b. Bidang II (Penanganan Darurat)
 1. Evaluasi, Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana
 - a) Rapat evaluasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana
 - b) Koordinasi Dropping Air Bersih
 - c) Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana
 2. BINTEK SAR, Latihan Gabungan Relawan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - a) Latihan Gabungan Relawan dan SAR
 - b) Latihan Tim Reaksi Cepat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - c) Latihan Manajemen Bidang Pengungsian, Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
 3. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda
 - a) Simulasi Penanganan Darurat Bagi Pelajar
 - b) Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat
 - c) Apel Siaga / Sarasehan PB
 - d) Uji Kompetensi / Sertifikasi Relawan

4. Pengembangan Pusdalops Jawa Tengah
 - a) Latihan Manajemen Posko dan Bintek Komunikasi dan Informasi
 - b) Pemantauan pada saat Hari-hari Besar Keagamaan dan Event Khusus Non Keagamaan
 - c) Posko Siaga Bencana
- c. Bidang III (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
 1. Sinergitas Multisektor Penanganan Pasca Bencana
 - a) Sinergitas Multisektor Penanganan Pasca Bencana
 2. Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - a) Pelatihan Jitu Pasna
 3. Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana
 - a) Pemulihan Kehidupan dan Penghidupan Kembali Masyarakat yang terdampak Bencana
 - b) Rakor Penanganan Rehab Rekon Pasca Bencana
 - c) Dokumen Kajian Rehab Rekon Jateng

Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) termasuk dalam Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Profil Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis Desa Bungasrejo⁶⁴

Desa Bungasrejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Desa yang terletak di dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 32° C, terdiri atas 3 pedukuhan yaitu: Sebelah barat:

⁶⁴Pemerintah Desa Bungasrejo, "Data Monografi Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati," 2020.

Bungascilik disebut juga Bungastempel Sebelah tengah: Bungas Sebelah timur: Druju. Untuk orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) Desa Bungasrejo sebagai berikut:

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 15 km
- Jarak dari Pemerintah Propinsi : 90 km
- Jarak dari Ibukota Negara : 450 km

Adapun batas wilayah Desa Bungasrejo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Sejomulyo
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Sembaturagung
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Glonggong
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Tondomulyo

Desa Bungasrejo secara keseluruhan memiliki luas wilayah 155 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari pemukiman 31,393 Ha, sawah dan ladang 81,564 Ha, empang 3 Ha, dan lain-lain.

Gambar 4.
Peta Desa Bungasrejo



(Sumber: Dokumen Peta Desa Bungasrejo)

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Bungasrejo pada tahun 2020 tercatat berjumlah 2.153 jiwa terdiri dari 662 KK (Kepala Keluarga). Berikut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1.
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	1.009 orang
2	Perempuan	1.144 orang
TOTAL		2.153 orang

Sumber: Data Monografi Desa Bungasrejo 2020

Pertumbuhan penduduk di Desa Bungasrejo terlihat cukup dinamis dengan adanya penambahan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat kematian dan kelahiran. Berikut data jumlah penduduk Desa Bungasrejo berdasarkan usia:

Tabel 2.
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	84	62	146
5-9	94	102	196
10-14	98	112	210
15-24	223	245	468
25-34	180	209	389
35-44	133	168	301
45-54	89	126	215
55-64	58	68	126
65 +	50	52	102
	1.009	1.144	2.153

Sumber: Data Monografi Desa Bungasrejo 2020

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting guna memajukan sumberdaya manusia yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian. Di Desa Bungasrejo terdapat 1 lembaga Taman Kanak-Kanan (TK) dan 1 Sekolah Dasar (SD) sebagai tempat untuk menuntut ilmu

pengetahuan umum serta 1 Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) guna menuntut ilmu agama.

Berikut data tingkat pendidikan penduduk Desa Bungasrejo:

Tabel 3.
Data Tingkat Pendidikan Warga Bungasrejo

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	56 Orang
2	Tidak Tamat SD	307 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	304 Orang
4	Tamat SLTP/Sederajat	261 Orang
5	Tamat SLTA/Sederajat	225 Orang
6	Diploma	24 Orang
7	Sarjana (S1-S3)	17 Orang
8	Buta Huruf	11 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Bungasrejo 2020

Dari data tersebut terlihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Bungasrejo masih cukup rendah dengan jumlah 307 orang yang tidak tamat SD. Disusul dengan 304 orang yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Masyarakat masih belum sadar akan pentingnya pendidikan di kehidupan mereka.⁶⁵ Disamping itu karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang beranggapan sekolah tinggi-tinggi menghabiskan uang, lebih baik langsung kerja saja. Padahal pendidikan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia untuk mendorong kemajuan dan berkembangnya suatu bangsa. Semakin baik tingkat pendidikan, maka dapat dikatakan kualitas sumberdaya manusia semakin baik, begitupun sebaliknya.

⁶⁵ Wawancara dengan Luwito Kito (Sekretaris Desa), 24 Februari 2021

4. Kondisi Ekonomi

Dengan luas wilayah yang sebagian besar digunakan untuk lahan sawah dan ladang, penduduk Desa Bungasrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Desa Bungasrejo bermacam macam statusnya, ada pemilik, penggarap, penyewa dan buruh tani. Tetapi mayoritas adalah petani pemilik, disini mereka memiliki lahan dan menggarap sawah yang mereka miliki. Pertanian yang dikelola warga berpusat pada sektor padi dan tidak sedikit pula yang menanam palawija. Oleh karena itu hasil pertanian merupakan salah satu sumber terbesar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain petani ada beberapa masyarakat yang mengadu nasib sebagai nelayan. Berhubung lokasi cukup dekat dengan Juwana, mereka banyak melaut mencari ikan didaerah tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Selain bertani dan melaut tidak sedikit masyarakat yang menjadi buruh di berbagai industri seperti di kuningan, merantau, berdagang di pasar, berwiraswasta dengan mendirikan toko kelontong, berwirausaha, dan lain-lain.⁶⁶

Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Bungasrejo:

Tabel 4.
Data Mata Pencaharian Warga Bungasrejo

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	500 Orang
2	Nelayan	150 Orang
3	Pedagang	54 Orang
4	Pekebun	-
5	Buruh Bangunan/Industri/Tambang	310 Orang
6	Sopir Angkutan	3 Orang
7	PNS	8 Orang
8	TNI	8 Orang
9	POLRI	5 Orang
10	Swasta	50 Orang
11	Wiraswasta	35 Orang

⁶⁶ Wawancara dengan Wasi Sudar (Kepala Desa), 11 Juni 2020

12	Pensiunan	4 Orang
13	Lain-lain	30 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Bungasrejo 2020

Dari data tersebut paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 500 orang. Meskipun Desa Bungasrejo memiliki lahan yang luas tetapi tidak ada yang menjadi pekebun karena faktor tanah yang tidak mendukung untuk ditanami sayuran. Dan yang bekerja sebagai buruh bangunan, tambang ataupun industri sebanyak 310 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari ada yang di industri kuningan, buruh bangunan, merantau dan sebagainya.

Untuk menambah penghasilan, masyarakat berinisiatif dengan membuka warung, bengkel dan toko. Jadi masyarakat tidak hanya menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian saja agar terus bisa menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁷

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Hubungan sosial masyarakat Desa Bungasrejo terlihat rukun dan harmonis. Tali persaudaraan dan persatuan masih sangat kental ditengah-tengah masyarakat dibuktikan dengan masih tingginya semangat gotong royong antar warga dimana gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat pedesaan. Wujud dari tingginya rasa persaudaraan dan kegotongroyongan terlihat ketika ada warga yang memiliki hajat mendirikan rumah, masyarakat sekitar antusias untuk membantu tanpa imbalan apapun atau yang lebih dikenal dengan istilah sambatan.

Begitupun saat kegiatan sedekah bumi, masyarakat Bungasrejo masih sepakat untuk melestarikan tradisi tersebut. Kegiatan tersebut sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan berbagi atas hasil panen yang selama ini masyarakat dapatkan. Kegiatan sedekah bumi ini rutin dilakukan setiap tahun oleh warga Bungasrejo tepatnya pada setiap hari Jumat Pon bulan *Apit* (Dzulqa'dah). Dalam kegiatan ini masyarakat berbondong-bondong menuju

⁶⁷ Wawancara dengan Wasi Sudar (Kepala Desa), 11 Juni 2020

punden dengan membawa ambengan (nasi berkat). Setelah semua masyarakat berkumpul dengan ambeng yang dibawa lalu dihajatkan atau didoakan oleh modin. Setelah itu ambengan dibagikan kepada masyarakat dari luar desa Bungasrejo. Untuk memeriahkan rangkaian acara diadakan kirab jalan santai dengan arak-arakan gunungan yang berisi berbagai macam hasil bumi dengan diiringi pasukan pawai yang mengenakan pakaian adat jawa lalu dibelakangnya diikuti oleh segenap masyarakat setempat.

Gambar 5.
Kirab Gunungan Sedekah Bumi Desa Bungasrejo



(Sumber: Dokumentasi Sedekah Bumi Desa 2019)

Untuk pertunjukan kesenian dalam acara sedekah bumi di Desa Bungasrejo berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Pati, karena di Desa Bungasrejo tidak ada kewajiban untuk mengadakan pertunjukan kesenian. Perihal pertunjukan kesenian diadakan kesepakatan dari semua warga masyarakat, tetapi yang paling sering adalah dengan mengadakan pertunjukan kesenian ketoprak.⁶⁸ Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan wilayah Pati bagian selatan dimana rata-rata menghadirkan pagelaran seni ketoprak, sedangkan Pati bagian utara mayoritas memilih pagelaran wayang kulit.

⁶⁸ Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 11 Maret 2021

Dalam hal beragama, seluruh masyarakat di Desa Bungasrejo memeluk agama Islam. Datanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.
Data penduduk Desa Bungasrejo berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.153 orang
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Buddha	-
6.	Lain-lain	-

Sumber: Data Monografi Desa Bungasrejo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Bungasrejo yang berjumlah 2.153 orang beragama Islam. Untuk mendukung kegiatan beragama terdapat 3 masjid di setiap pedukuhan. Di dukuh Bungastemplek dipandang sebagian masyarakat Desa Bungasrejo sebagai lokasi yang paling religius diantara pedukuhan lainnya.⁶⁹ Jadi banyak kegiatan keagamaan yang aktif di dukuh tersebut, tapi tidak menutup kegiatan keagamaan juga masih berjalan di dukuh lainnya.

Meskipun begitu, masyarakat hidup dengan rukun dan damai. Sejauh ini tidak ada perselisihan antar warga dikarenakan rasa toleransi dan saling menghargai masih sangat dijunjung tinggi apalagi umat satu agama dan satu desa sudah seperti saudara sendiri.

⁶⁹ Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 24 Februari 2021

C. Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu kegiatan penanggulangan bencana pengembangan masyarakat tangguh bencana yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.⁷⁰

Sejarah adanya program Desa Tangguh Bencana dilaksanakan di Desa Bungasrejo berawal dari BPBD Provinsi Jawa Tengah mendorong BPBD tingkat kabupaten untuk mengembangkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pada tahap awal BPBD tingkat kabupaten perlu berperan aktif mendorong dan memfasilitasi desa-desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini.

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mengajukan proposal usulan terkait beberapa desa di Kabupaten Pati yang memiliki beberapa indikator desa rawan bencana kepada BPBD

⁷⁰Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Provinsi Jawa Tengah yang nantinya diharapkan bisa menjadi tempat pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana. Kemudian BPBD Provinsi mengkonfirmasi dengan mengadakan rapat dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk menentukan desa mana yang paling tepat sebagai tempat pelaksanaan program DESTANA berikutnya dengan mengedepankan skala prioritas.⁷¹ Alasan memilih Desa Bungasrejo pertama, melihat desa Bungasrejo salah satu desa di Kecamatan Jakenan yang memiliki potensi ancaman risiko tinggi terhadap bencana banjir. Terlebih pada tahun 2018 menjadi tahun dengan banjir terparah dengan genangan air yang merendam desa ini sekitar 2 meter. Kedua, selain banjir pada saat musim kemarau desa ini juga mengalami kekeringan. Ketiga, kapasitas sumberdaya manusia dalam hal kebencanaan dinilai perlu untuk ditingkatkan dengan cara memandirikan/memberdayakan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Untuk memperlancar jalannya pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, maka fasilitator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama fasilitator dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah membuat tahapan agar mempermudah pelaksanaan program tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemaparan Masalah (*problem posing*)

Tahap ini merupakan tahap awal fasilitator dalam mengumpulkan berbagai macam persoalan yang ada di Desa Bungasrejo. Fasilitator untuk survey lokasi melakukan assesment awal guna mengumpulkan informasi awal daerah Desa Bungasrejo termasuk daerah rawan bencana dan seberapa besar potensi ancamannya kemudian hasilnya diinformasikan dan dimusyawarahkan bersama masyarakat. Hal ini diungkap oleh Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah, berikut penturannya:

“jadi gini, kami fasilitator langsung turun ke lapangan guna melihat masalah yang dihadapi masyarakat seperti mengecek daerah

⁷¹ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

tersebut benar-benar daerah rawan bencana dengan melihat data kependudukan, peta desa, jenis ancaman, dan lain-lain. Nah dari itu semua kita himpun sebagai informasi awal kondisi ketangguhan desa. Untuk apa? nanti kita rembug bersama masyarakat, dimana nantinya sebagai salah satu indikator guna menentukan apa saja kegiatan yang akan diadakan.”⁷²

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Setyo Ardhi (Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah). Menurut beliau pada tahap awal dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana adalah survei lokasi, kondisi lingkungan dan minat sumberdaya manusia. Berikut penuturannya:

“hal pertama yang kita lakukan dalam menentukan sebuah program , kita disana itu survei menentukan kelayakannya, seminar lokasi, minat sumberdayanya. Alhamdulillah minat disini bagus, dukungan pemdesnya juga bagus, masyarakatnya juga menerima dengan bagus. Jadi, kita oke disana.”⁷³

Setelah itu diadakan pertemuan kecil antara fasilitator dan perwakilan masyarakat. Disini tim fasilitator menginformasikan apa saja hasil yang ditemukan di awal seperti kondisi lingkungan Bungasrejo yang merupakan daerah rawan bencana dibuktikan dengan adanya wilayah tepatnya di pedukuhan Bungastemplek yang berbatasan langsung dengan Sungai Silugonggo, ditengah desa Bungasrejo juga dibelah oleh Daerah Aliran Sungai Juwana. Potensi ancaman di Desa Bungasrejo yakni luapan air sungai saat terjadi banjir kebanyakan merendam daerah persawahan dan sebagian pemukiman warga. Masalah lain yang berasal dari SDMnya antara lain kebiasaan warga saat terjadi banjir menyelamatkan harta dan dokumen penting kedalam kardus yangmana kardus tersebut rawan jika terkena air. Dalam perjalanan menuju tempat evakuasi masih banyak warga yang belum mengetahui jalur mana yang nantinya tidak terdampak bencana banjir. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan kelompok rentan

⁷² Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

⁷³Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

terlebih dahulu saat terjadi bencana. Sedangkan untuk minat atau ketertarikan masyarakat terhadap pelatihan program Destana sangat tinggi dengan adanya antusias peserta yang ikut dan ditambah dengan dukungan jajaran pemerintah desa yang mendukung kegiatan Destana ini.⁷⁴

2. Tahap Analisis Masalah (*problem analysis*)

Pada tahap ini fasilitator menggali pendapat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang ada kemudian disatukan untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan minat masyarakat.

Setelah mengetahui berbagai masalah dan ancaman baik dari lingkungan maupun sumberdaya manusia yang ada di Desa Bungasrejo, dalam menganalisis masalah fasilitator melihat kekuatan maupun peluang yang bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti pembuatan peta risiko bencana dan pembuatan jalur evakuasi dibutuhkan warga untuk mengetahui daerah rawan dan jalur mana saja yang aman untuk dilewati saat bencana banjir. Sedangkan dari minat masyarakat yang sangat tinggi dan antusias bisa kita manfaatkan guna melakukan pelatihan dan simulasi untuk mendahulukan penyelamatan kelompok rentan saat terjadi bencana banjir.⁷⁵

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah, berikut penjelasannya:

“tentunya dalam proses menentukan apa-apa yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu kegiatan harus mempertimbangkan apa yang ada dilokasi, seperti kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat, minat dan kapasitas sumberdaya manusianya. Perlu diingat mas, itu semua harus berdasarkan dengan permasalahan yang ada dilapangan dan juga apa yang diinginkan masyarakat, jadi kita analisis dulu, supaya nanti saat program berjalan itu tidak sia-sia dan tentu ada manfaatnya.”⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

Analisis seperti ini perlu dilakukan supaya setelah mengikuti kegiatan program Desa Tangguh Bencana sesuai dengan tujuan awal yakni ingin mewujudkan masyarakat tangguh bencana berdasarkan ilmu, pengalaman dan pelatihan yang mereka peroleh. Harapan khususnya masyarakat dapat mandiri menganali potensi ancaman dan risiko bencana yang mereka hadapi karena tinggal di daerah rawan bencana.

3. Tahap Penentuan Tujuan (*aims*) dan Sasaran (*objectives*)

Pada tahap penentuan tujuan, tujuan kegiatan dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- b. Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha.
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
- d. Mendorong integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa.⁷⁷

Sedangkan untuk sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan adalah masyarakat dan aparatur desa memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana. Prioritas sasaran ialah desa/kelurahan yang berada di Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo juga mengacu pada indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam Perka BNPB 1/2012. Indikato-indikator yang ada disesuaikan dengan kondisi

⁷⁷ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, “Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020,” 2.

daerah pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini difokuskan kegiatan antara lain:

- a) Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana Kontijensi
- b) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana
- c) Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
- d) Pelatihan untuk Tim Relawan
- e) Pelibatan/Partisipasi Warga Desa
- f) Pelibatan Perempuan dalam Tim Relawan
- g) Pembuatan Peta dan Analisa Risiko
- h) Pembuatan Peta dan Jalur Evakuasi serta Tempat Pengungsian
- i) Perlindungan Kesehatan kepada Kelompok Rentan
- j) Perlindungan Aset Produktif Utama Masyarakat

Hal tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mengatakan:

“penentuan sasaran itu mas, kita juga mengacu pada Perka BNPB 1/2012 tadi. Tapi tidak semuanya kita lakukan, tapi kita sesuaikan dengan keadaan lokasi tadi. Untuk desa ini, kita kuatkan dalam pembuatan rencana aksi, pembentukan Forum PRB, pembentukan relawan, pembuatan peta, evakuasi dan lain-lain. Nanti saya kasih file lengkapnya mas.”⁷⁸

4. Tahap Perencanaan Tindakan (*action plans*)

Pada tahap perencanaan tindakan disusun tindakan-tindakan yang berhubungan dengan program Desa Tangguh Bencana, misalnya siapa saja yang terlibat, waktu pelaksanaan yang harus menyesuaikan dengan kesiapan masyarakat, dukungan dari berbagai *stakeholder*, tempat yang tepat untuk menjalankan kegiatan, sumber dana kegiatan. Hal itu semua perlu direncanakan diawal sebelum kegiatan berlangsung.

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku fasilitator Forum PRB Jateng, menurut beliau proses perencanaan dalam program DESTANA Bungasrejo ini melalui diskusi dengan masyarakat setempat. Fasilitator disini memandu apa hal apa saja yang didiskusikan terkait mekanisme kegiatan. Mulai dari tempat kegiatan, kegiatan utama yang diinginkan oleh masyarakat dan lain sebagainya supaya jelas apa saja nanti yang dibutuhkan, manfaat serta output bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut penjelasannya:

“sebelum masuk ke pelaksanaan ada beberapa perencanaan yang kita lakukan, jadi kita sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat biasanya dengan tekni *word cafe* agar lebih cair suasana. Jadi mereka yang diskusi, mereka yang berdebat sesuai dengan pengetahuan mereka sambil ngopi-ngopi lah, dengan tetap kita pandu kegiatan apa yang mereka inginkan kita tampung semua nanti kita arahkan sesuai dengan skala prioritas. Untuk tempat dan waktu pun kita tawarkan, kan sudah ada jadwal pakemnya, tetap kita sampaikan kepada masyarakat siap tidak jam segini? Kalau ga siapnya kapan? Jadi kalau begitu asik mas, kita berkegiatan kan memang tidak ada paksaan. Supaya apa, ya sesuai tujuan kita supaya terasa manfaatnya, masyarakat tidak terbebani. Kalau dana sebetulnya setiap desa harus ada anggaran untuk dana bencana, tapi ini program BPBD jadi ada anggaran yang sudah diplotkan untuk kegiatan ini.”⁷⁹

Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah, beliau menambahkan bahwa:

“suatu perencanaan tindakan nantinya akan menentukan baiknya keberlangsungan suatu program. Dalam hal ini perencanaan yang disusun dalam program DESTANA di Bungasrejo meliputi penentuan waktu pelaksanaan dengan menyesuaikan kesiapan masyarakat. Soalnya gini mas, masyarakat kan ada yang bilang, kalau pagi saya bekerja pak, saya dagang dan sebagainya. Jadi kita rencanakan okelah sesuai dengan kesiapan masyarakat, kalau bisanya malam ya kita laksanakan malam asalkan durasi waktunya sesuai dengan jadwal kita yang awal. Selanjutnya dukungan dari stakeholder nya, alhamdulillah semua komponen mendukung mas.

⁷⁹ Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

Untuk pendanaan kegiatan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada di sini mas.”⁸⁰

Hal senada dikatakan oleh Bapak Setyo Ardhi, menurut beliau dalam sebuah merencanakan tindakan harus mempertimbangkan lokasi, waktu, dana dan sumberdaya yang ada. Berikut penuturannya:

“untuk merencanakan suatu tindakan ya harus ada rencana yang benar-benar matang mas, misal kita pertimbangkan soal waktu dan tempat pelaksanaan yang pas, dana darimana, terus sumberdaya yang ada juga mas. SDA maupun SDM.”⁸¹

5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berlangsung selama 5 hari, tanggal 21-25 Oktober 2019 bertempat di Kantor Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur aparatur desa, karangtaruna, tokoh masyarakat/agama, kelompok PKK Desa, relawan PB, Babinsa dan Babinkamtibmas.⁸² Narasumber dan fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Forum Pengurang Risiko Bencana (PRB) Jawa Tengah.

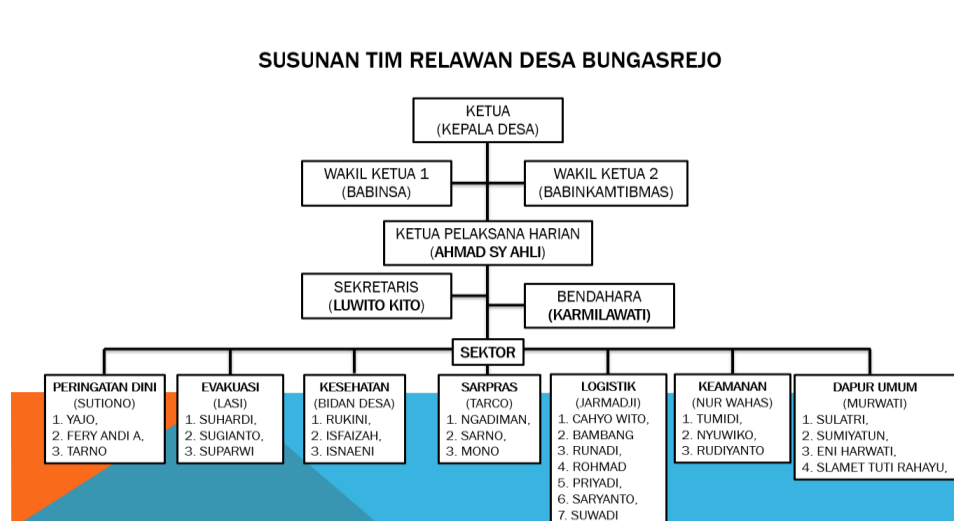
Dari 50 orang peserta tersebut nantinya akan dibentuk Tim Relawan Desa dan Forum PRB Desa. Tim Relawan Bencana Desa merupakan relawan yang aktif saat kejadian bencana. Berikut susunan Tim Relawan Desa Bungasrejo:

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

⁸¹ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

⁸² Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

Gambar 6.
Susunan Tim Relawan Desa Bungasrejo
Tahun 2019



(Sumber: Laporan Hasil Pembentukan DESTANA Desa Bungasrejo)

Dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 hari, peserta dibagi menjadi beberapa sektor mulai dari sektor peringatan dini, evakuasi, kesehatan, sarpras, logistik, keamanan dan dapur umum. Setyo Ardhi selaku Forum PRB Jawa Tengah mengungkapkan:

“kegiatan berlangsung selama 5 hari, jadi disitu kita libatkan aktif masyarakat dalam semua kegiatan dari hari pertama mulai dari tracking wilayah berupa ada susur sungai, mengidentifikasi problem yang mereka hadapi, pembentukan relawan, pembentukan Forum PRB Desa, pembuatan peta, simulasi. Semua supaya masyarakat mandiri dan terlatih dalam menghadapi ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dan banyak lagi mas.”⁸³

Selama kegiatan berlangsung peserta didampingi oleh fasilitator untuk menjalankan berbagai kegiatan pada program DESTANA sesuai dengan sektor dan jadwal yang telah ditentukan. Berikut jadwal kegiatan DESTANA Bungasrejo:

⁸³ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

Tabel 6.
Jadwal Kegiatan Destana Bungasrejo
Kec. Jakenan Kab. Pati

Hari	Kegiatan
Senin, 21 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sambutan Kepala Desa Bungasrejo 2. Sambutan Perwakilah Kalakhar BPBD Prov. Jateng 3. Pemaparan oleh Bp. Gunawan Wibisono selaku TGUPP (Tim Gugus Percepatan Untuk Pelaksanaan Pembangunan) dengan materi Sosialisasi Desa Tangguh Bencana 4. Perkenalan dan Kontrak Belajar bersama fasilitator 5. Tracking menuju titik ancaman dan area terdampak
Selasa, 22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi hasil tracking pada hari pertama tentang identifikasi ancaman bencana di tiap dusun 2. Mengidentifikasi kegiatan yang pernah dilakukan, masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki pada bidang pengelolaan pemukiman dan perumahan, sosial, budaya, agama, pendidikan, infrastruktur, ekonomi serta pemerintahan desa 3. Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang meliputi ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dimiliki desa Bungasrejo
Rabu, 23 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Reaksi Komunitas <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pra Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Rumah Evakuasi - Peningkatan Kapasitas Tim Relawan Desa - Persiapan Persediaan Pangan - Pengadaan Perahu Fiber - Pengadaan Obat-obatan - Pengadaan Peralatan Dapur Umum b. Program Tanggap Darurat <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Barak Pengungsian - Pembuatan Dapur Umum - Pembuatan Rakit - Pendirian Sekolah Darurat - Pengobatan pada Pengungsi - Evakuasi Korban c. Program Pasca Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Jalan Desa - Perbaikan Jembatan - Pembersihan Fasilitas Umum - Pelayanan Kesehatan

	2. Pembuatan Peta Risiko Bencana
Kamis, 24 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi/Kedaruratan) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Skenario Kejadian Bencana - Struktur Komando - Identifikasi Kebutuhan - SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Desa 3. Simulasi
Jumat, 25 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gladi 2. Evaluasi dan Penutupan <ul style="list-style-type: none"> - Seminar Hasil Pembentukan Destana

(Sumber: Laporan Hasil Pembentukan DESTANA Desa Bungasrejo)

Bapak Jani Prasetyo selaku (Mantan Kepala Desa Bungasrejo) mengatakan bahwa masyarakat begitu antusias dalam mengikuti program Desa Tangguh Bencana ini. Di hari pertama masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait program Desa Tangguh Bencana, mulai dari kebencanaan, Undang-Undang yang mengatur DESTANA, tujuan program DESTANA dan kegiatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Berikut penjelasannya:

“masyarakat disini alhamdulillah sangat *welcome* mas dengan adanya kegiatan ini, dihari pertama mereka cukup antusias dalam mengikuti sosialisasi Desa Tangguh Bencana. disitu mereka dibuka dengan memberi materi mengenai apa itu bencana, cara menanggulangi, daerah yang termasuk rawan bencana, tujuan desa tangguh bencana, terus ada undang-undangnya. Alhamdulillah, saya juga ikut bersyukur.”⁸⁴

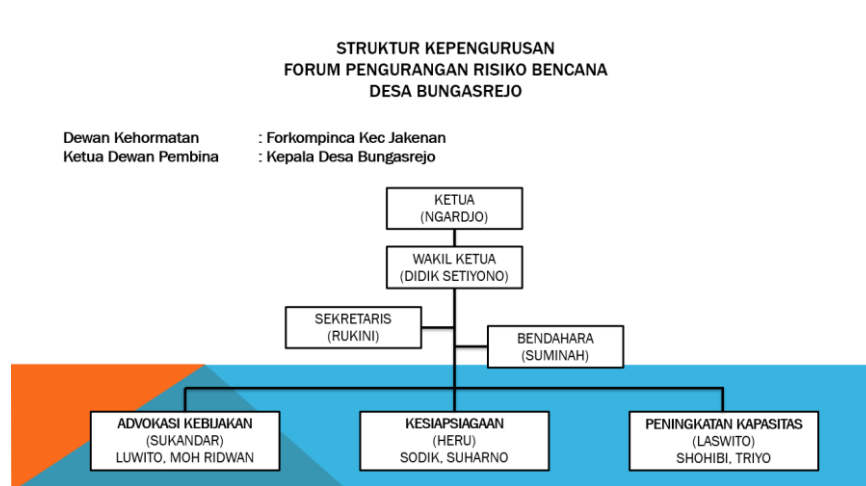
Tak hanya hari pertama peserta antusias, hari berikutnya selama 5 hari peserta tetap mengikuti kegiatan dengan sangat aktif. Dengan melibatkan peremuan khususnya dari tim PKK menambah aktif suasana. Tim PKK aktif di bagian dapur umum dengan dilibatkan dilatih guna menyiapkan segala peralatan dapur umum dan pembuatan dapur umum. Di

⁸⁴ Wawancara dengan Jani Prasetyo (Mantan Kades), 11 Juni 2020

kegiatan ini peserta benar-benar dilatih seperti saat terjadi bencana. Apa saja yang diperlukan dan harus dilakukan mereka harus siap.

Dalam kategori kelembagaan dibentuklah Relawan Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini nantinya yang akan aktif saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Berikut struktur kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Bungasrejo:

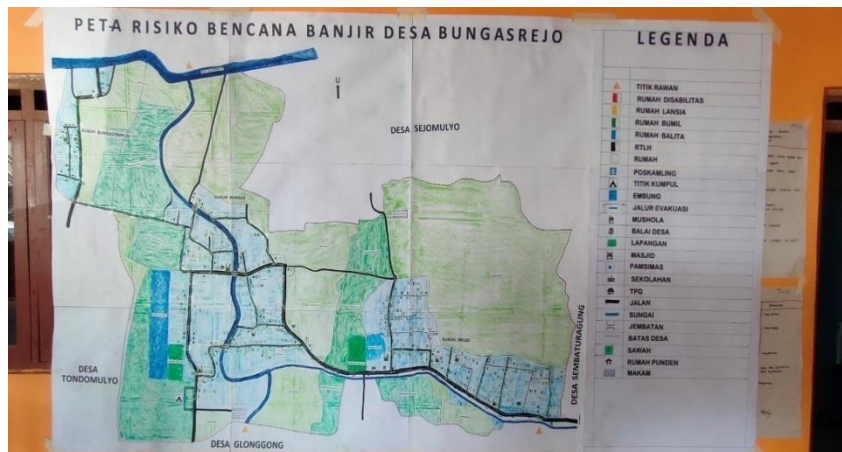
Gambar 7.
Struktur Forum PRB
Desa Bungasrejo



(Sumber: Laporan Hasil Pembentukan Destana Desa Bungasrejo)

Sedangkan dalam kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana peserta dilibatkan aktif membuat peta risiko bencana desa, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Berikut peta risiko bencana banjir Desa Bungasrejo:

Gambar 8.
Peta Risiko Bencan Banjir
Desa Bungasrejo



(Sumber: Laporan Hasil Pembentukan Destana Desa Bungasrejo)

Dalam peta ini terdapat berbagai macam petunjuk yang bisa dipelajari oleh masyarakat desa Bungasrejo mulai dari titik rawan bencana, titik kumpul, jalur evakuasi dan sebagainya.

6. Tahap Evaluasi

Setiap mengadakan suatu kegiatan tahap evaluasi merupakan tahap terakhir sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan perbaikan terhadap hasil pelaksanaan suatu program. Begitupun dalam akhir kegiatan program Desa Tangguh Bencana dilakukan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari program tersebut.

Menurut Bapak Muhammad Chomsul selaku Kabid Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam evaluasi program Desa Tangguh Bencana dilaksanakan sebuah seminar hasil pelaksanaan Desa Tangguh Bencana dalam sebuah forum. Peserta yang terlibat harus memaparkan hasil yang dicapai selama 5 hari mengikuti kegiatan program ini. Selain memaparkan kegiatan apa saja, hasil apa yang dicapai, peserta juga diberi kesempatan untuk memberikan usul, pendapat dan saran kepada fasilitator

terkait kegiatan program Desa Tangguh Bencana di desa mereka. Berikut penuturannya:

“proses evaluasi setiap akhir kegiatan nanti ada berupa seminar hasil kegiatan, biasanya mereka akan memaparkan kegiatan selama 5 hari, hasil apa saja yang didapat, usulan-usulan apa, begitu. Kalau untuk setelah untuk monevnya kita akui agak lemah mas, tapi buka berarti kita abai, bukan. Tetap kita pantau lewat grup-grup wa, namun ya tidak bisa intens karena kesibukan dan jadwal kami.”⁸⁵

Setelah kegiatan ini selesai, program Desa Tangguh Bencana tidak berakhir begitu saja. Program ini dituntut ada keberlanjutannya terutama pada Forum Pengurangan Risiko Bencana yang telah dibentuk. Forum tersebut harus siap aktif setiap saat mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Meskipun fasilitator tidak bisa selalu terjun ke lapangan untuk monitoring, tetapi terus di pantau lewat grup-grup *Whatsapp* karena mereka berharap forum ini menjadi forum yang mandiri dan mampu menggerakkan anggota dan masyarakat lainnya.

Menurut Bapak Ngarjo selaku Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana, beliau mengatakan mengenai keberlanjutan program tetap kami usahakan. Dalam forum kecil yang kami buat, disitu dibahas mengenai indikator apa yang belum tercapai selama kegiatan berlangsung dan mencoba mengembangkan indikator-indikator yang belum tercapai secara sempurna.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Ngarjo (Ketua FPRB Desa), 18 Juni 2020

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Program Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo dilaksanakan dengan tujuan guna memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dapat beradaptasi dengan mengenali ancaman yang ada secara mandiri agar menjadi masyarakat tangguh bencana. Pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan-hambatan diakibatkan banyak sekali faktor perbedaan. Begitupun dengan pelaksanaan program tersebut ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dialami peserta maupun fasilitator Desa Tangguh Bencana.

Faktor pendukung pelaksanaan program pelatihan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan meliputi:

1. Dukungan dari Pemerintah Desa

Dukungan dari segenap pemerintah desa merupakan salah satu unsur yang dapat membantu keberlangsungan sebuah program di suatu desa. Dalam hal pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo mendapat dukungan dari segenap pemerintah desa seperti pemerintah menyambut baik adanya program ini dan dapat bekerjasama dengan pihak BPBD dengan baik. Hal ini seperti diungkap Bapak Muhammad Chomsul (BPBD Provinsi Jawa Tengah), berikut penuturannya:

“ya, untuk faktor pendukung ini mas, dari pemerintah desa, lembaga desa, perangkat semua sangat welcome dengan adanya program destana ini mas. Dari itu mereka mau bekerjasama dengan baik.”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

Hal serupa diungkap oleh Bapak Jani Prasetyo (Mantan Kepala Desa Bungasrejo), berikut penjelasannya:

“kami sangat mendukung kegiatan ini, karena menurut kami program ini sangat baik dan bermanfaat untuk melatih warga kami tentang kebencanaan.”⁸⁸

Bapak Sutrisno selaku fasilitator dari Forum PRB Jateng menambahkan dukungan pemerintah Desa Bungasrejo, berikut penjelasannya:

“pemerintah Desa Bungasrejo sangat baik, dengan mau menandatangani SK dan menurunkan nomor SK PRB itu sudah merupakan salah satu dukungan yang luar biasa.”⁸⁹

2. Dukungan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program pembentukan Desa Tangguh Bencana karena merupakan salah satu program pembangunan nasional. Dukungan yang diberikan seperti anggaran dana, sarana mobilitas, personel serta kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Berikut penuturan Bapak Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah:

“dukungan pemerintah provinsi pasti ada mas, bahkan pemprov menggenjot pembentukan destana ini, mulai dari anggaran, sarana dan kebijakan-kebijakan. Berharap dengan program ini warga desa khususnya di Jawa Tengah mampu mengenali karakter wilayah, potensi ancaman dan cara menangannya.”⁹⁰

Untuk dana yang digelontorkan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2019 adalah senilai Rp. 3.000.000.000.⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan Jani Prasetyo (Mantan Kades), 11 Juni 2020

⁸⁹ Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

⁹¹ PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah, “KAK 2019,” accessed April 29, 2021, <https://bpbid.jatengprov.go.id/PPID/wp-content/uploads/2019/11/KAK-2019-ALL.pdf>.

3. Masyarakat Berpartisipasi Aktif

Pada pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungarejo partisipasi masyarakat sangat aktif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wasi Sudar (Kepala Desa Bungasrejo) bahwa:

“peserta sangat aktif, mereka sangat senang mengikuti kegiatan dalam program DESTANA. Terlebih dalam kegiatan simulasi. Pokoknya mereka berpartisipasi aktif mas.”⁹²

Gambar 9.
Simulasi Evakuasi Bencana



(Sumber: Dokumentasi Kegiatan Destana Bungasrejo)

Hal senada disampaikan oleh Suwadi (Perwakilan Peserta Destana) bahwa:

“ya peserta aktif, terlebih dalam acara ke lapangan, saat simulasi begitu. Ibu-ibu PKK juga sangat terlihat aktif dan senang sekali di dapur umum.”⁹³

Pihak Forum PRB Jawa Tengah (Setyo Ardhi) juga menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat yang merupakan faktor pendukung saat pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo, berikut penjelasannya:

“diawal ada sebagian peserta yang agak ragu, tapi itu diawal saja, selebihnya mereka sangat baik, sigap dan sangat aktif

⁹² Wawancara dengan Wasi Sudar (Kepala Desa), 11 Juni 2020

⁹³ Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 24 Februari 2021

mengikuti kegiatan sampai akhir. Biasalah, keraguan diawal pasti ada namanya orang berbeda-beda.”⁹⁴

4. Kegotongroyongan

Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Bungasrejo tidak terlepas dari sikap gotong royong warganya. Hal ini juga menjadi faktor yang mendorong keberhasilan program Destana ini. Masyarakat percaya dengan semua aktifitas dikerjakan dengan bergotong royong akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Hal ini sesuai wawancara dengan Suwadi (Peserta Destana) yang mengatakan bahwa:

“selain kami aktif, kami juga senang bekerja sama. Sebagai warga desa kami sudah terbiasa dengan gotong royong mas. Seperti pada saat kegiatan pembuatan peta, simulasi dan lain sebagainya.”⁹⁵

5. Fasilitator yang berkompeten

Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Bungasrejo bisa terlaksana dengan baik didukung dengan adanya tim fasilitator yang berkompeten dalam bidang kebencanaan yang berasal dari Forum PRB Jawa Tengah. Hal ini sesuai wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng) yang mengatakan:

“dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo kami dibantu oleh fasilitator dari Forum PRB Jawa Tengah yang berkompeten dan ahli di bidang kebencanaan khususnya bidang pengurangan risiko bencana. Di lapangan mereka yang langsung mendampingi masyarakat.”⁹⁶

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo tak terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat ini dirasakan oleh berbagai pihak yang terkait. Berikut faktor penghambat pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Desa Bungasrejo:

⁹⁴ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 24 Februari 2021

⁹⁶ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Bungasrejo. Masyarakat desa Bungasrejo merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah pantura, pesisir yang karakternya keras dan susah diatur. Sebagaimana diungkap oleh Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jawa Tengah bahwa:

“karakter masyarakat berbeda-beda ya mas, ada masyarakat yang tinggal di daerah pantura, pesisir dan pegunungan. Kebetulan di Bungasrejo daerah pantura, pesisir yang memiliki karakter keras. Jadi ada yang suka *ngeyel* gitu mas, apalagi kalau lagi diskusi. Tapi ya biasa, kita maklumi.”⁹⁷

2. Kapasitas Masyarakat

Salah satu faktor yang membedakan kapasitas masyarakat adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Desa Bungasrejo yang mayoritas lulusan SD, SMP kadang sulit untuk diajak berfikir. Ada dari peserta yang hanya mengikuti begitu saja. Sebagaimana diungkap Bapak Jani Prasetyo (Mantan Kepala Desa Bungasrejo) bahwa:

“masyarakat ya ada yang susah diajak berfikir mas, karena ya maaf rata-rata pendidikan SD, SMP dan basicnya mereka orang lapangan artinya sering bekerja di sawah, pabrik. Jadi mereka agak kurang suka kalau diajak berfikir merumuskan sesuatu.”⁹⁸

Hal senada juga diungkap oleh Suwadi (Peserta Destana) bahwa:

“kami lebih suka dilapangan mas kalau kegiatan, karena kita sudah terbiasa, disawah, dikandang dan di pabrik.”⁹⁹

3. Sikap *Skeptis* Peserta

Sikap *skeptis*/ragu peserta juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo. Dikarenakan masyarakat sudah terbiasa sendiri tanpa bantuan dari pihak

⁹⁷ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Jani Prasetyo (Mantan Kades), 11 Juni 2020

⁹⁹ Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 24 Februari 2021

luar. Jadi dengan diadakannya program ini masyarakat bertanya-tanya dan ragu untuk apa program ini dan apa hasilnya. Sebagaimana diungkap oleh Bapak Setyo Ardhi selaku Forum PRB Jawa Tengah bahwa:

“awalnya mereka *skeptis* dengan kita mas, karena sejauh ini mereka berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, pihak luar. Jadi mereka ragu dengan kita. Tapi itu hanya diawal sebelum kegiatan saja.”¹⁰⁰

4. Peserta Kurang Berani Menyampaikan Pendapat

Ada peserta yang kurang berani untuk menyampaikan pendapat, ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo. Peserta mempunyai ide dan berani bicara kalau diluar forum, tapi kalau diforum mereka kurang berani untuk menyampaikan. Hal ini diungkap oleh Bapak Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jawa Tengah bahwa:

“ada peserta yang vocalnya bagus mas kalau diluar forum, mereka mempunyai ide tapi kalau didalam forum yang bersangkutan ga berani menyampaikan.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN DESA TANGGUH
BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BUNGASREJO
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI**

A. Analisis Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat)

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.¹⁰² Menurut pasal 4 Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:¹⁰³

1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

¹⁰²Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁰³Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh bencana, sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana dengan Pembentukan Desa Tangguh di daerah rawan bencana di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan rangkaian kegiatan berupa lokakarya mengenali lebih baik desanya sendiri, mengembangkan kajian risiko, menyusun rencana-rencana tindakan mengurangi risiko bencana, sosialisasi, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan penanggulangan bencana.¹⁰⁴ BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah rawan bencana di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sejak Tahun 2015.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.¹⁰⁵

Hal ini diperkuat Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang menyatakan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

¹⁰⁴Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020," 1.

¹⁰⁵Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, bahwasannya kegiatan penanggulangan bencana merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini memiliki arti bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpengaruh positif terhadap perubahan kehidupan masyarakat pada pengetahuan dan kemandirian tentang penanggulangan bencana. Sebagaimana dilaksanakannya program Desa Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri mengenali potensi ancaman yang ada di daerahnya dan supaya mereka mampu secara mandiri melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Beberapa kegiatan juga telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya membentuk masyarakat mandiri dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana ini. Diantaranya dengan melakukan identifikasi masalah dan potensi yang dimiliki, pembuatan peta risiko bencana, penentuan titik kumpul, penentuan jalur evakuasi, pembentukan relawan dan Forum PRB, dan simulasi kegiatan penanggulangan bencana saat terjadi bencana.

Tahapan-tahapan dalam menjalankan sebuah kegiatan berdasarkan pengembangan masyarakat terdapat enam tahapan meliputi:

1. Tahap pemaparan masalah (*problem posing*): tahap mengelompokkan dan menentukan masalah dan persoalan yang dihadapi warga dari kelompok tersebut. Masyarakat umumnya menyadari permasalahan yang mereka

hadapi tapi tak bisa diungkapkan. Peran pekerja sosial disini adalah memberikan penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah dengan kelompok tersebut.

2. Tahap analisis masalah (*problem analysis*): tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*): tahap ini pekerja sosial bersama masyarakat menentukan tujuan yang menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang dan statemen tentang petunjuk umum. Sementara sasaran lebih bersifat lebih khusus dibanding tujuan. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada masyarakat.
4. Tahap perencanaan tindakan (*action plans*): tahap ini merupakan tahap kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pekerja sosial memperhatikan tenaga kerja, waktu, faktor penghambat & pendukung, permasalahan stakeholder dan segala segala hal yang terkait dengan kegiatan.
5. Tahap pelaksanaan kegiatan: tahap mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Pekerja sosial dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat aksi yang dilakukan.
6. Tahap evaluasi, dilaksanakan secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan bahkan harian.¹⁰⁶

Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mampu menggunakan enam tahapan yang ditulis oleh Zubaedi dalam buku Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Keenam tahapan yang digunakan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program Desa Tangguh Bencana

¹⁰⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 84–86.

di Desa Bungasrejo meliputi tahap pemaparan masalah (*problem posing*), tahap analisis masalah (*problem analysis*), tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*), tahap perencanaan tindakan (*action plans*), tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap evaluasi. Dengan keenam tahapan tersebut sudah mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini didukung dengan pernyataan yang didapat peneliti di lapangan yang menyatakan bahwa:

1. Tahap Pemaparan Masalah (*Problem Posing*)

Tahap mengelompokkan dan menentukan masalah dan persoalan yang dihadapi warga dari kelompok tersebut. Masyarakat umumnya menyadari permasalahan yang mereka hadapi tapi tak bisa diungkapkan. Peran pekerja sosial disini adalah memberikan penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah dengan kelompok tersebut.¹⁰⁷

Menurut pernyataan Muhammad Chomsul selaku Kabid Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan bahwa pertama dimulai dari mengumpulkan dan menentukan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan dimusyawarahkan bersama masyarakat. Berikut pernyataannya:

“jadi gini, kami fasilitator langsung turun ke lapangan guna melihat masalah yang dihadapi masyarakat seperti mengecek daerah tersebut benar-benar daerah rawan bencana dengan melihat data kependudukan, peta desa, jenis ancaman, dan lain-lain. Nah dari itu semua kita himpun sebagai informasi awal kondisi ketangguhan desa. Untuk apa? nanti kita rembug bersama masyarakat, dimana nantinya sebagai salah satu indikator guna menentukan apa saja kegiatan yang akan diadakan.”¹⁰⁸

Dari pernyataan tersebut memiliki makna bahwa tahap pemaparan masalah dalam program Desa Tangguh Bencana BPBP Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁰⁷Zubaedi, 84.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

2. Tahap analisis masalah (*problem analysis*)

Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹⁰⁹ Dalam proses analisis masalah pekerja sosial dapat menerapkan salah satu metode pengembangan masyarakat. Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah mengatakan proses analisis kegiatan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan minat masyarakat itu sendiri. Berikut penjelasannya :

“tentunya dalam proses menentukan apa-apa yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu kegiatan harus mempertimbangkan apa yang ada dilokasi, seperti kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat, minat dan kapasitas sumberdaya manusianya. Perlu diingat mas, itu semua harus berdasarkan dengan permasalahan yang ada dilapangan dan juga apa yang diinginkan masyarakat, jadi kita analisis dulu, supaya nanti saat program berjalan itu tidak sia-sia dan tentu ada manfaatnya.”¹¹⁰

Dari yang dituturkan oleh informan dapat dikatakan bahwa dalam proses analisis masalah dimulai dengan merumuskan masalah-masalah yang ada di lokasi, melibatkan masyarakat setempat dan fasilitator yang berkompeten, setelah itu proses diskusi antara semua *stakeholder* terkait, dan kemudian menganalisis masalah secara bersama-sama. Dari hal tersebut dapat dikatakan fasilitator menggunakan metode FGD (*focus grup discussion*) dengan membuat forum diskusi bersama pemangku kepentingan program dengan difasilitatori oleh Forum PRB Jawa Tengah dimana tahap-tahapnya sesuai dengan yang ada pada metode FGD meliputi perumusan kejelasan FGD, identifikasi partisipan dan narasumber yang berkompeten, pelaksanaan diskusi dan analisis data hasil diskusi.

Dalam tahap pemaparan dan analisis masalah dalam implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo, penulis setuju bahwa tahapan itu telah sesuai dengan tahap pengembangan masyarakat sesuai

¹⁰⁹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 84.

¹¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

sebagaimana yang dijelaskan Zubaedi dalam bukunya Pengembangan Masyarakat bahwasannya tahap pemaparan masalah dan tahap analisis masalah merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan.

3. Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*)

Tahap ini pekerja sosial bersama masyarakat menentukan tujuan yang menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang dan statemen tentang petunjuk umum. Sementara sasaran lebih bersifat lebih khusus dibanding tujuan. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada masyarakat.¹¹¹

Tujuan dibentuknya program Desa Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- b. Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha.
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
- d. Mendorong integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa.¹¹²

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan adalah masyarakat dan aparat desa memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana.

¹¹¹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 85.

¹¹² Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020," 2.

Dalam hal ini, program Desa Tangguh Bencana dalam penentuan indikatornya juga disesuaikan dengan keadaan lokasi Desa Bungasrejo dengan difokuskan pada:

- a. Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana Kontijensi
- b. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana
- c. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
- d. Pelatihan untuk Tim Relawan
- e. Pelibatan/Partisipasi Warga Desa
- f. Pelibatan Perempuan dalam Tim Relawan
- g. Pembuatan Peta dan Analisa Risiko
- h. Pembuatan Peta dan Jalur Evakuasi serta Tempat Pengungsian
- i. Perlindungan Kesehatan kepada Kelompok Rentan
- j. Perlindungan Aset Produktif Utama Masyarakat

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*) telah sesuai sebagaimana dalam penentuan tujuan menunjuk pada tujuan jangka panjang seperti dengan terwujudnya ketangguhan masyarakat diharapkan kedepannya masyarakat dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dapat mandiri dalam mengenali ancaman serta mampu mengurangi risiko bencana di wilayahnya. Untuk penentuan sasaran juga telah sesuai karena kegiatan yang akan dilakukan sudah diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan keadaan lokasi masyarakat.

4. Tahap perencanaan tindakan (*action plans*)

Tahap ini merupakan tahap kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pekerja sosial memperhatikan tenaga kerja, waktu, faktor penghambat & pendukung, permasalahan stakeholder dan segala segala hal yang terkait dengan kegiatan.¹¹³ Dari penuturan

¹¹³Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 85.

Muhammad Chomsul selaku Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa perencanaan tindakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan karena akan menentukan baiknya keberlangsungan suatu program.

“suatu perencanaan tindakan nantinya akan menentukan baiknya keberlangsungan suatu program. Dalam hal ini perencanaan yang disusun dalam program DESTANA di Bungasrejo meliputi penentuan waktu pelaksanaan dengan menyesuaikan kesiapan masyarakat. Soalnya gini mas, masyarakat kan ada yang bilang, kalau pagi saya bekerja pak, saya dagang dan sebagainya. Jadi kita rencanakan okelah sesuai dengan kesiapan masyarakat, kalau bisanya malam ya kita laksanakan malam asalkan durasi waktunya sesuai dengan jadwal kita yang awal. Selanjutnya dukungan dari stakeholder nya, alhamdulillah semua komponen mendukung mas. Untuk pendanaan kegiatan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada di sini mas.”¹¹⁴

Hal senada diungkap oleh Bapak Sutrisno selaku fasilitator Forum PRB Jateng, berikut penjelasannya:

“sebelum masuk ke pelaksanaan ada beberapa perencanaan yang kita lakukan, jadi kita sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat biasanya dengan tekni *word cafe* agar lebih cair suasana. Jadi mereka yang diskusi, mereka yang berdebat sesuai dengan pengetahuan mereka sambil ngopi-ngopi lah, dengan tetap kita pandu kegiatan apa yang mereka inginkan kita tampung semua nanti kita arahkan sesuai dengan skala prioritas. Untuk tempat dan waktu pun kita tawarkan, kan sudah ada jadwal pakemnya, tetap kita sampaikan kepada masyarakat siap tidak jam segini? Kalau ga siapnya kapan? Jadi kalau begitu asik mas, kita berkegiatan kan memang tidak ada paksaan. Supaya apa, ya sesuai tujuan kita supaya terasa manfaatnya, masyarakat tidak terbebani. Kalau dana sebetulnya setiap desa harus ada anggaran untuk dana bencana, tapi ini program BPBD jadi ada anggaran yang sudah diplotkan untuk kegiatan ini.”¹¹⁵

Dari hasil penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan tindakan yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo sudah

¹¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

¹¹⁵ Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

sesuai dengan tahapan pengembangan masyarakat karena dalam tahap tersebut memperhatikan waktu, tenaga kerja, stakeholder dan segala yang terkait dengan kegiatan dan juga melibatkan masyarakat yang akan diberdayakan bukan secara sepihak diputuskan oleh pihak pemberdaya.

5. Tahap pelaksanaan kegiatan

Tahap mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Pekerja sosial dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat aksi yang dilakukan.¹¹⁶

Pada pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berlangsung selama 5 hari, tanggal 21-25 Oktober 2019 bertempat di Kantor Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari unsur aparatur desa, karangtaruna, tokoh masyarakat/agama, kelompok PKK Desa, relawan PB, Babinsa dan Babinkamtibmas. Dari 50 orang peserta tersebut nantinya akan dibentuk Tim Relawan Desa dan Forum PRB Desa. Menurut penuturan Setyo Ardhi selaku Forum PRB Jawa Tengah, selama 5 hari peserta dilatih untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, identifikasi ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada, pembuatan peta risiko bencana, dan pembentukan relawan dan forum PRB desa.

“kegiatan berlangsung selama 5 hari, jadi disitu kita libatkan aktif masyarakat dalam semua kegiatan dari hari pertama mulai dari tracking wilayah berupa ada susur sungai, mengidentifikasi problem yang mereka hadapi, pembentukan relawan, pembentukan Forum PRB Desa, pembuatan peta, simulasi. Semua supaya masyarakat mandiri dan terlatih dalam menghadapi ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dan banyak lagi mas.”¹¹⁷

¹¹⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 86.

¹¹⁷ Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo telah berjalan sesuai dengan yang dirancang sebelumnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi peserta karena mendapat pengetahuan baru tentang kebencanaan serta mendapatkan skill baru tentang kebencanaan khususnya untuk mengurangi risiko bencana di wilayahnya.

6. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan bahkan harian. Muhammad Chomsul selaku Kabid Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah menuturkan:

“proses evaluasi setiap akhir kegiatan nanti ada berupa seminar hasil kegiatan, biasanya mereka akan memaparkan kegiatan selama 5 hari, hasil apa saja yang didapat, usulan-usulan apa, begitu. Kalau untuk setelah untuk monevnya kita akui agak lemah mas, tapi buka berarti kita abai, bukan. Tetap kita pantau lewat grup-grup wa, namun ya tidak bisa intens karena kesibukan dan jadwal kami.”¹¹⁸

Dari penuturan tersebut proses evaluasi kegiatan program Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo sudah berjalan dengan baik. Namun menurut peneliti kurang sesuai dengan tahap evaluasi dalam tahap pengembangan masyarakat yang diuraikan oleh Zubaedi dalam bukunya pengembangan masyarakat yang menyatakan bahwa tahap evaluasi dilaksanakan secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan bahkan harian. Karena dalam hal ini evaluasi kegiatan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo belum bisa melakukan evaluasi secara intens.

¹¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Dalam proses pelaksanaan sebuah program, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak terlepas akan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Begitupun dalam pelaksanaan program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kec. Jakenan Kab. Pati tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kec. Jakenan Kab. Pati secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.
Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Dukungan dari pemerintah desa	1. Karakteristik masyarakat
2. Dukungan dari pemerintah provinsi	2. Kapasitas masyarakat yang berbeda
3. Masyarakat berpartisipasi aktif	3. Sikap <i>skeptis</i> masyarakat
4. Kegotongroyongan	4. Peserta kurang berani menyampaikan pendapat
5. Fasilitator yang berkompeten	

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pelatihan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo ada yang bersumber dari dalam (internal) dan dari luar (eskternal). Untuk menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor

yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).¹¹⁹ Dalam analisis SWOT dibagi menjadi 2 bagian yakni faktor internal (*strenght* dan *weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity* dan *threat*).

Dalam pelaksanaan program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kec. Jakenan Kab. Pati, dapat dilihat faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 8.
Faktor Internal dan Eksternal
Pelaksanaan Program Destana Bungasrejo

Internal		Eksternal	
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
a. Fasilitator yang berkompeten	-	a. Dukungan dari pemerintah desa b. Dukungan dari pemerintah provinsi c. Kegotongroyongan Masyarakat d. Partisipasi Aktif Masyarakat	a. Karakteristik masyarakat b. Kapasitas masyarakat yang berbeda c. Sikap <i>skeptis</i> masyarakat d. Peserta kurang berani menyampaikan pendapat

Dari data tabel tersebut, faktor pendukung dan penghambat dalam program pelatihan Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo dapat dikatakan berasal dari internal dan eksternal, meliputi:

1. Faktor Internal

a. *Strength* (Kekuatan)

Fasilitator yang berkompeten, dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Bungasrejo didampingi oleh fasilitator dari

¹¹⁹Nazaruddin, *Manajemen Strategik* (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), 32.

Forum PRB Jawa Tengah yang berkompeten dan ahli di bidang kebencanaan khususnya bidang pengurangan risiko bencana.

2. Faktor Eksternal

a. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Dukungan dari pemerintah desa, dukungan ini berupa penyambutan dari pihak desa yang baik juga pihak pemerintah desa membantu mensosialisasikan akan diadakannya program Desa Tangguh kepada masyarakat.
- 2) Dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah provinsi Jawa Tengah sangat mendukung kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana karena merupakan salah satu program yang mendukung pembangunan nasional agar Desa/Kelurahan khususnya di Jawa Tengah memiliki masyarakat yang sadar dan mampu mengenali risiko wilayahnya. Selain itu juga anggaran yang khusus ditujukan untuk program penanggulangan bencana.
- 3) Sikap gotong royong, sudah menjadi bagian penting dari masyarakat pedesaan. Masyarakat Desa Bungasrejo sudah terbiasa hidup bergotong royong, sehingga dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana sikap gotong royongpun diterapkan. Karena masyarakat beranggapan program ini ada untuk mereka, jadi jika dilaksanakan secara bersama-sama akan terasa ringan dan juga selesai dengan cepat.
- 4) Partisipasi aktif masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi saat mengikuti pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana.

b. *Threat* (Ancaman)

- 1) Karakteristik masyarakat, hal ini jadi faktor penghambat karena masyarakat desa Bungasrejo merupakan masyarakat yang tinggal di pantura, jadi memiliki karakter/watak yang keras.

- 2) Kapasitas masyarakat yang berbeda, background pendidikan dan pengetahuan yang tidak sama berpengaruh dalam pelaksanaan program. Karena ada saja yang kurang suka untuk diajak berfikir karena lebih menyukai untuk langsung terjun di lapangan.
- 3) Sikap skeptis masyarakat, pada awal pelaksanaan program ada sebagian masyarakat yang ragu akan diadakannya program Destana ini, karena selama bertahun-tahun terjadi banjir masyarakat selalu bekerja sendiri dan belum ada kegiatan seperti ini.
- 4) Peserta kurang berani menyampaikan pendapat, dalam proses diskusi ada masyarakat yang kurang berani untuk menyampaikan pendapatnya, padahal mereka mempunyai ide dan kalau diluar forum vocalnya cukup bagus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo dilakukan dengan tahapan pemaparan masalah, analisis masalah, penentuan tujuan dan sasaran, perencanaan tindakan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama untuk menganalisa ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas yang mereka miliki dalam sebuah kelompok diskusi. Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana ini berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari berbagai macam materi seperti:
 - a) Sosialisasi Desa Tangguh Bencana.
 - b) Analisa ancaman, kerentanan dan potensi.
 - c) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB).
 - d) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK).
 - e) Pembuatan Peta Risiko Bencana.
 - f) Penyusunan Renkon (Rencana Kontigensi/Kedaruratan).
 - g) Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Desa.
 - h) Simulasi.
2. Faktor pendukung implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo sebagai berikut:
 - a) Secara internal yaitu adanya fasilitator yang berkompeten dalam bidang kebencanaan dari Forum PRB Jawa Tengah.
 - b) Secara eksternal meliputi dukungan pemerintah desa; dukungan pemerintah provinsi; sikap gotong royong masyarakat; partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo adalah sebagai berikut: Secara eksternal meliputi karakteristik masyarakat yang berwatak keras; kapasitas masyarakat yang berbeda; sikap *skeptis* masyarakat; peserta kurang berani menyampaikan pendapat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo, peneliti akan memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Saran untuk BPBD Provinsi Jawa Tengah
 - a. Penyelenggaraan monitoring khususnya kepada Forum PRB Desa dapat dilakukan secara instensif dengan langsung datang ke lapangan tidak hanya lewat virtual.
 - b. Dalam perekrutan peserta akan lebih baik diberikan kriteria-kriteria tertentu khususnya dalam kriteria pendidikan dan lebih banyak melibatkan pemuda dalam perekrutan tersebut.
 - c. Pihak BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan agar terus dapat membina Desa Bungasrejo dan dapat memperluas implementasi program Desa Tangguh Bencana ke daerah yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi.
2. Saran untuk Masyarakat Desa Bungasrejo
 - a. Masyarakat diharapkan selalu siap dan giat menerapkan pelatihan-pelatihan yang telah didapat karena sangat bermanfaat dalam pengurangan risiko bencana.
 - b. Masyarakat yang terbentuk sebagai Forum Pengurangan Risiko Desa harus lebih aktif lagi melakukan tugas dan fungsinya karena forum ini harus ada pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Acu, Andri. "Update Bencana Indonesia Tahun 2020." BNPB.go.id, 2020. <https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-indonesia-tahun-2020>.
- Ananda, Rusydi, Tien Rafida, and Candra Wijaya. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana, 2017.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. "Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020," 2020.
- . "Profil BPBD." Accessed March 1, 2021. http://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE_DOWNLOAD/PROFIL/PROFIL_BPBD.pdf.
- . "Tugas Pokok Dan Fungsi." Accessed March 1, 2021. http://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE_DOWNLOAD/TUPOKSI/TUGAS_POKOK_DAN_FUNGSI.pdf.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arti Pengembangan Masyarakat." kbbi.kemdikbud.go.id. Accessed February 3, 2021. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan masyarakat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan_masyarakat).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Jawa Tengah Province in Figures 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. "Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana." *Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, 2012.
- Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (n.d.).
- Dumasari. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR Bekerja sama dengan UMP Press, 2014.
- Ginanjari, Yogi Cahyo. "Manajemen Bencana," 2018. <https://bpbd.babelprov.go.id/manajemen-bencana/>.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Iranti, Deski. "Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi."

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Irawan, Muhammad Dedi, and Selli Aprilla Simargolang. "Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika." *JURTI (Jurnal Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (2018): 67–84.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munir, Miftakhul. "Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kendal, Skripsi." Universitas Diponegoro, 2016.
- Nazaruddin. *Manajemen Strategik*. Palembang: NoerFikri Offset, 2020.
- Ningtyas, Mustika Wati Alfia. "Penguatan Kelompok Tangguh Bencana (Pendampingan Dalam Upaya Membangun Kemandirian Masyarakat Siaga Banjir Di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban), Skripsi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Nugroho, Pratomo Cahyo. *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018.
- Nurwahyudi, Ragil, and Maryono. *Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Aspek Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Gabus)*. Semarang: UNDIP, 2018.
- Pemerintah Desa Bungasrejo. "Data Monografi Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati," 2020.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (2012).
- Perbukuan, Badan Pengembangan Bahasa dan. "Arti Implementasi." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.
- PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah. "KAK 20." Accessed March 2, 2021. <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/wp-content/uploads/2020/06/KAK-2020-ALL.pdf>.
- . "KAK 2019." Accessed April 29, 2021. <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/wp-content/uploads/2019/11/KAK-2019-ALL.pdf>.
- . "Profil BPBD Provinsi Jawa Tengah." Accessed March 1, 2021. <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/profil-bpbd/>.
- . "Struktur Organisasi BPBD Prov. Jateng." Accessed March 1, 2021. <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/struktur-organisasi/>.
- . "Visi Misi BPBD Jawa Tengah 2019-2024." Accessed March 1, 2021. <https://bpbd.jatengprov.go.id/PPID/2018/01/15/visi-dan-misi-jawa-tengah/>.
- "Profil Kampung KB Lestari," 2017. <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11303>.

- Raco, J R. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Sinaga, Maruli Tua. “Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.” UNIVERSITAS LAMPUNG, 2019.
- Siska Haryati, Aji Sudarsonom, Eko Suryana. “Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu).” *Jurnal Media Infotama* 11, no. 2 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukezi dan Hartati Kanty Astuti, Sri Handini. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir.” Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka Press, 2019.
- Sulistiyawan. *Manajemen Bencana Mari Kenali Ancamannya Dan Kurangi Risikonya*. Semarang: Seminar Kampus Relawan, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- Yunus, Mahmud. *Tarjamahan Al-Quran Karim*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zahrah, Zahirah. “Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jurnal.” Universitas Diponegoro, 2017.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Wawancara dengan Jani Prasetyo (Mantan Kades), 11 Juni 2020
- Wawancara dengan Luwito Kito (Sekretaris Desa), 24 Februari 2021
- Wawancara dengan Muhammad Chomsul (Kasi Pencegahan BPBD Prov. Jateng), 26 Februari 2021
- Wawancara dengan Ngarjo (Ketua FPRB Desa), 18 Juni 2020
- Wawancara dengan Safrudin (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov Jawa Tengah), 09 Juni 2020

Wawancara dengan Setyo Ardhi (Fasilitator), 17 Juni 2020

Wawancara dengan Sutrisno (Fasilitator), 01 April 2021

Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 24 Februari 2021

Wawancara dengan Suwadi (Peserta Program Destana), 11 Maret 2021

Wawancara dengan Wasi Sudar (Kepala Desa), 11 Juni 2020

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan Destana Bungasrejo

Tracking titik ancaman dan area terdampak



Penyusunan Dokumen Renkon



Pembentukan Forum PRB Desa



Foto bersama Fasilitator



B. Wawancara dengan Narasumber







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKERTARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Imam Bonjol No. 1 F Telp. 024-3519927 (Hunting), 3519932 Fax. 024-3519186
E-mail : bpbd_jateng@yahoo.com
SEMARANG 50141

Semarang, 26 Februari 2021

Nomor : 900-2/163A /BPBD/2021
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Semarang
Cq. Kepala Bagian Tata Usaha
di -
SEMARANG

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang nomor : B-0332/Un.10.4/K/PP.00.9/01/2020 tanggal 29 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Riset Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yaitu :

Nama : Khoirul Ali Ahmadi
NIM : 1701046008
Judul Skripsi : Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Perspektif Pengembangan Masyarakat)

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dimaksud telah melaksanakan riset di Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ptt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JAKENAN
DESA BUNGASREJO

Sekretariat : Jln Desa Bungasrejo Km. 01 Kode Pos 59182

No. Kode Desa / Kelurahan :
33.18.09.0023

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/43

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : WASI SUDAR
- b. Umur : 43 tahun
- c. Jabatan : Kepala Desa Bungasrejo
- d. Alamat : Desa Bungasrejo Rt 02 Rw 1 Kecamatan Jakenan
Kabupaten Pati.

Dengan ini menerangkan bahwa nama **Khoirul Ali Ahmadi** NIM 1701046008 dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul skripsi "IMPLEMENTASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI (Perspektif Pengembangan Masyarakat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungasrejo, 24 Februari 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Ali Ahmadi
NIM : 1701046008
TTL : Pati, 24 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Mantingan Tengah RT 04 RW 02 Kec. Jakenan
Kab. Pati
Email : khoirulaliahmadi@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Mantingan Tengah
2. MTs Miftahul Falah Jakenan
3. SMK Salafiyah Kajen Pati

Semarang, 15 April 2021

Khoirul Ali Ahmadi
1701046008